

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PESISIR DAN PANTAI (P2MPP) GUNA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi pada Desa Kilensari Kecamatan Panarukan  
Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu**

**Administrasi Universitas Brawijaya**

**FARIZ AFRIANSYAH AGANY  
NIM. 0910310220**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2014**

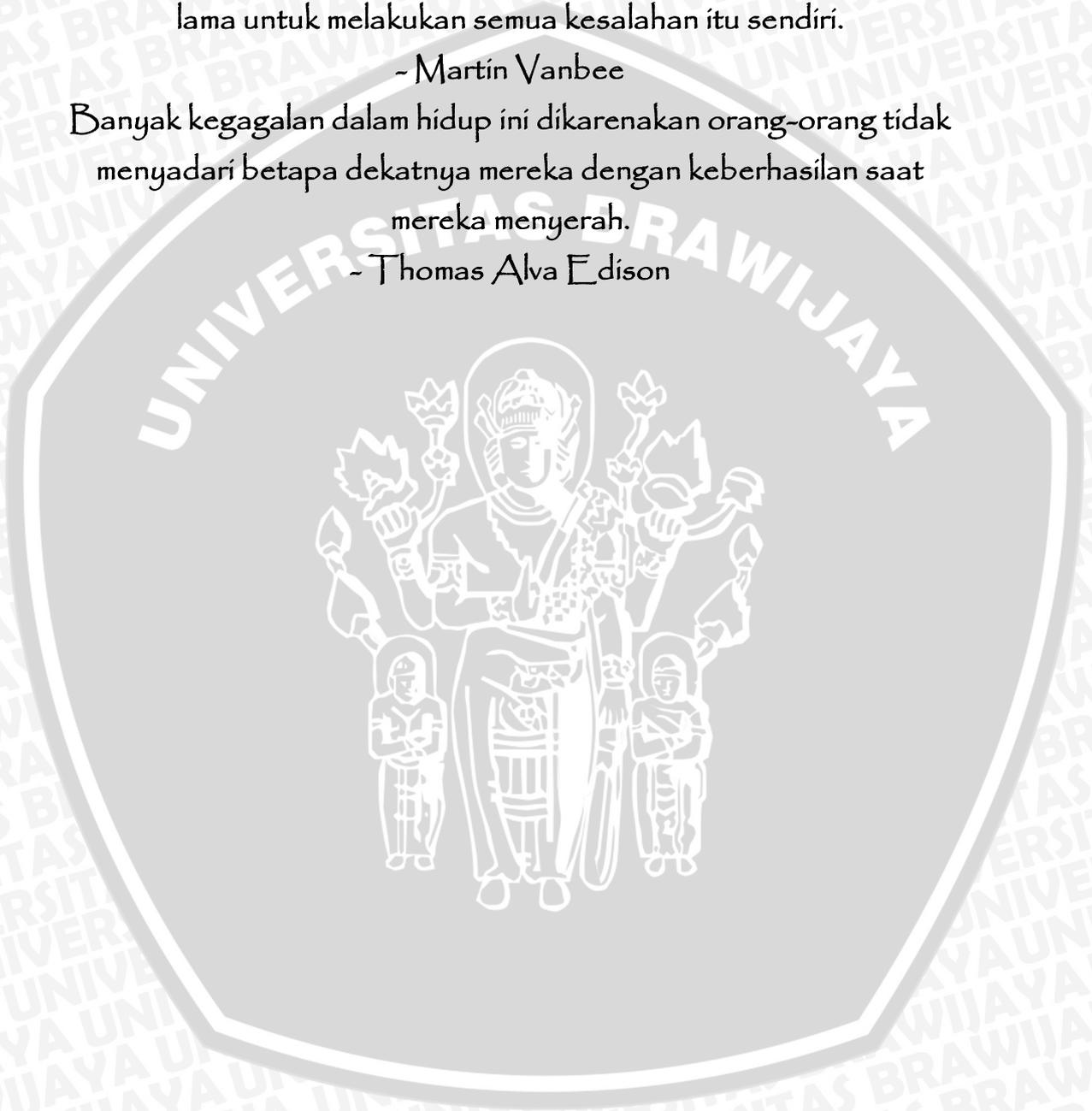
## MOTTO

Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri.

- Martin Vanbee

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

- Thomas Alva Edison





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227  
E-mail : [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id) <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis  
- Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata  
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Pelaksanaan Program Pemberdaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)  
Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. (Studi pada Desa Kilensari  
Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)

Disusun oleh : Fariz Afriansyah Agany

NIM : 0910310220

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi : -

Malang, 10 Juli 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

**Dr. Mochamad Makmur, Ms**  
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota

**Dr. Abdullah Said, M.Si**  
NIP. 19570911 198503 1 003

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Agustus 2014

Jam : 09.00 WIB

Skripsi atas nama : Fariz Afriansyah Agany

Judul : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PESISIR DAN PANTAI GUNA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi pada Desa Kilensari Kecamatan Panarukan  
Kabupaten Situbondo)

dan dinyatakan lulus

### MAJELIS PENGUJI

Ketua



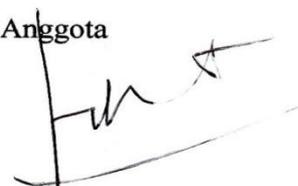
**Dr. Mochamad Makmur, MS**  
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



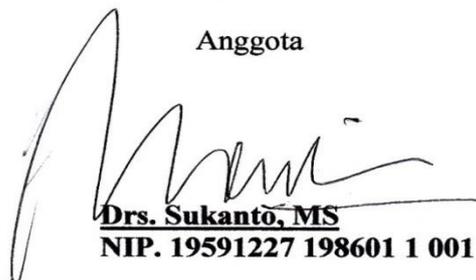
**Dr. Abdullah Said, M.Si**  
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota



**Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS**  
NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota



**Drs. Sukanto, MS**  
NIP. 19591227 198601 1 001



## Ringkasan

Fariz Afriansyah Agany, 2014 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. **Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. (Studi kasus pada Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)** Tim Pembimbing Dr. Mochamad Makmur, MS dan Drs. Abdullah Said, M.Si

Di Indonesia sebagian besar masyarakat pesisir masih berada di garis kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah khususnya di Jawa Timur dirasa perlu untuk mencanangkan suatu program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat pesisir dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi guna mengentaskan kemiskinan. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sangat relevan dikaji lebih dalam dengan pokok permasalahan yang mengarah pada implementasi P2MPP dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan P2MPP di Desa Kilensari.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program P2MPP di Desa Kilensari, serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong Pelaksanaan Program P2MPP di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Panarukan.

Adapun metodologi dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian, dilakukan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan pemanfaatan data sekunder sebagai pendukung informasi. Fokus yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pantai

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari program P2MPP dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kilensari berupa adanya UPKu Bina Insan Bahari yang melaksanakan Unit

Simpan Pinjam (USP) kepada masyarakat setempat guna membantu masyarakat dalam mengakses dana yang diberikan pemerintah. Dalam pelaksanaan USP banyak terjadi kredit macet. Ini dikarenakan beberapa faktor seperti usahanya bangkrut, terkena musibah dan ada niatan tidak membayar.

Kesimpulan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai secara keseluruhan berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam yang masih berjalan sampai sekarang. Pelaksanaan program P2MPP juga mempunyai manfaat yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat pesisir. Manfaat dari program P2MPP paling dirasakan oleh masyarakat miskin dan masyarakat hampir miskin yang sangat membantu dalam hal permodalan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dari masyarakat tersebut. Namun untuk masyarakat pelaku ekonomi mikro manfaat Unit Simpan pinjam tidak begitu berpengaruh karena adanya batasan peminjaman yang diberikan.

Adapun saran bagi penyempurnaan dan perbaikan program P2MPP di masa yang akan datang yaitu, perlu adanya sosialisasi yang lebih baik oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program, sehingga dapat tercapai pemahaman yang baik pada masyarakat sasaran. Perlu juga adanya penyuluhan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat mampu dan lebih berani untuk melakukan wirausaha dengan menyadari dan mengetahui potensi alam yang ada di desa mereka.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)

## Summary

Fariz Afriansyah Agany, 2014 Department of Public Administration, Faculty of Administration, University of Brawijaya. Implementation of Coastal and Beach Community Empowerment Program (P2MPP) To Improve Public Welfare. (Case studies on Kilensari Village, District Panarukan Situbondo) Team Supervisor Dr. Mochamad Makmur, MS and Drs. Abdullah Said, M.Si

In Indonesia, most of the coastal communities are still in poverty. Therefore, the Agency for Community Empowerment (Bapemas) in East Java Province at 2010 had implemented the Coastal and Beach Community Empowerment Program (P2MPP) that to improve the welfare of the community.

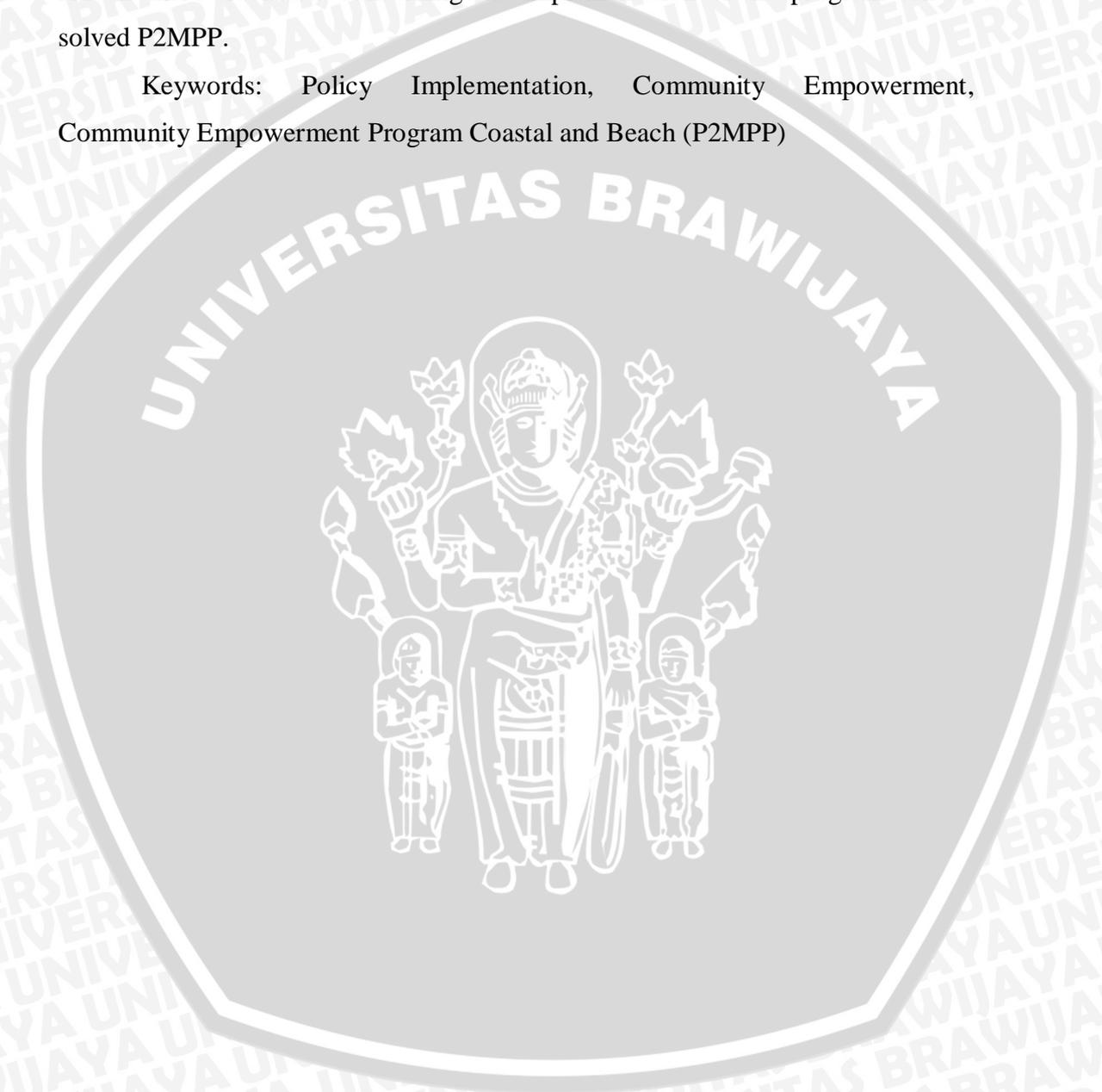
The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of P2MPP, as well as to describe and analyze the enabling and constraining factors of P2MPP in the Kilensari Village, Panarukan, Situbondo

The methodology is used in the study is a research method with a qualitative approach with descriptive research. To facilitate researchers in conducting research was conducted through the interview method of data collection, documentation and utilization of secondary data as supporting information

Based on the results of the study showed that the implementation of P2MPP to improve the welfare of the people in the village such as the presence Kilensari UPKu Bina Insan Bahari conduct savings and loans business (USP) for local communities to assist people in accessing funds provided by the government. However, this activity was not fully run optimally. It can be seen from the implementation of USP which is only used by the minority of population, as well as bad credit is also an obstacle in the implementation of the P2MPP.

P2MPP conclusion of implementation program in order to improve the welfare of society in general that has been going well, but still need to be improved sustainability and still need the attention of various parties concerned. And if there are issues concerning the implementation of the program can be solved P2MPP.

Keywords: Policy Implementation, Community Empowerment, Community Empowerment Program Coastal and Beach (P2MPP)



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya peneliti dapat mengatasi hambatan-hambatan yang harus dilalui sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena tidak luput dari bantuan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yang telah menyetujui dan mengesahkan skripsi ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Administrasi Publik.
2. Lely Indah Mindarti, Dra, M,Si selaku ketua jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mendorong kami agar dapat menyelesaikan studi dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Bapak Dr. Mochamad Makmur, Ms. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Drs. Abdullah Said, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan saran, arahan, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi serta menjadi penerjemah dalam proses adaptasi alat ukur dalam skripsi ini.
4. Kedua orangtua, yaitu Ayahanda Misyari Agany dan Ibunda Khudaifah, serta adikku yaitu Faizatul Fitriyah yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Sahabat dan teman dari peneliti, yaitu Mas Yusqi Faizin, Mas Minod, Mas Dira Sekeluarga, Dinar Ruhul Imam, Fani Bayu N, Hilman Wildana P, Dinar Ardy Y, Danizar Robby F, Hodo, Arfin, Firna, Nia, Putri, Cici, Pepeng, Tito, Oki, Adul, Inyong, Dani dan semua Saudara atas segala pemberian motivasi dan semangat pada penulis sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan, serta pada seluruh teman-teman dari FIA 2009 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan.

6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan telah mendukung serta memperlancar penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan yang sesuai atas jasanya yang telah peneliti rasakan manfaatnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan manusia, oleh karena itu di dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti membuka diri untuk menerima setiap kritik dan saran yang akan menjadi acuan bagi peneliti di masa datang agar menjadi lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri dan orang lain yang membacanya. Atas perhatiannya, peneliti mengucapkan terima kasih.

Malang, Juli 2014

Peneliti



Fariz Afriansyah Agany

**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Administrasi Publik.....	11
B. Kebijakan Publik .....	13
1. Konsep Kebijakan Publik .....	13
2. Mekanisme Kebijakan Publik .....	18
C. Implementasi Kebijakan .....	19
1. Definisi Implementasi Kebijakan .....	19
2. Langkah-Langkah dalam Implementasi Kebijakan .....	20
3. Model Implementasi Kebijakan .....	23
D. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat .....	31
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	31
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	32



3. Permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	33
4. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat .....	35
5. Partisipasi Masyarakat .....	37
6. Partisipasi dalam Pemberdayaan .....	39
E. Kemiskinan.....	41
F. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian .....	51
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	52
D. Sumber dan Jenis Data .....	53
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Instrumen Penelitian.....	56
G. Analisis Data.....	56

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum .....	59
1. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo .....	59
2. Gambaran Umum Desa Kilensari Kecamatan Panarukan .	63
a. Sejarah Singkat .....	63
b. Keadaan Penduduk.....	64
c. Tingkat Pendidikan .....	65
d. Mata Pencaharian .....	67
e. Fasilitas Desa .....	68
B. Data Fokus	
Pelaksanaan Program P2MPP .....	69
a. Pihak-Pihak Terkait dalam Program P2MPP .....	70
1) UPKu.....	70
2) Kepala Desa.....	75

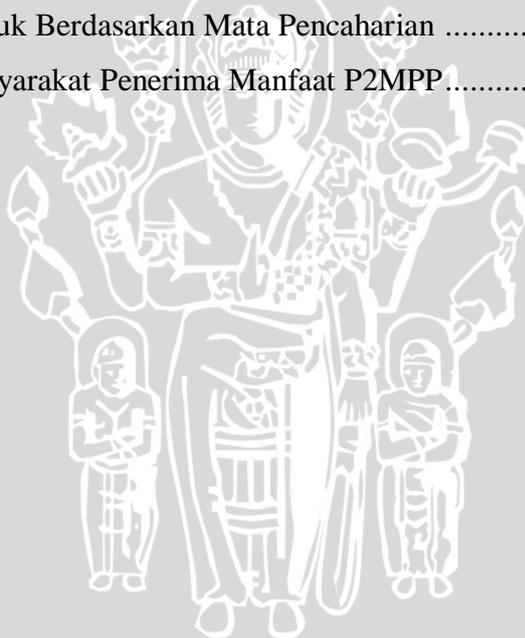


3) RTS .....	76
b. Proses Pelaksanaan Program P2MPP .....	77
1) Tahan Persiapan dan Sosialisasi .....	77
2) Tahap Pengelolaan Dana P2MPP .....	79
c. Faktor Pendukung dan Penghambat Program P2MPP .....	87
1) Faktor Pendukung .....	88
2) Faktor Penghambat .....	90
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	91
1. Pelaksanaan Program P2MPP .....	91
2. Pihak-Pihak Terkait dalam Program P2MPP .....	97
3. Manfaat Program P2MPP dibidang Ekonomi .....	99
4. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	101
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109



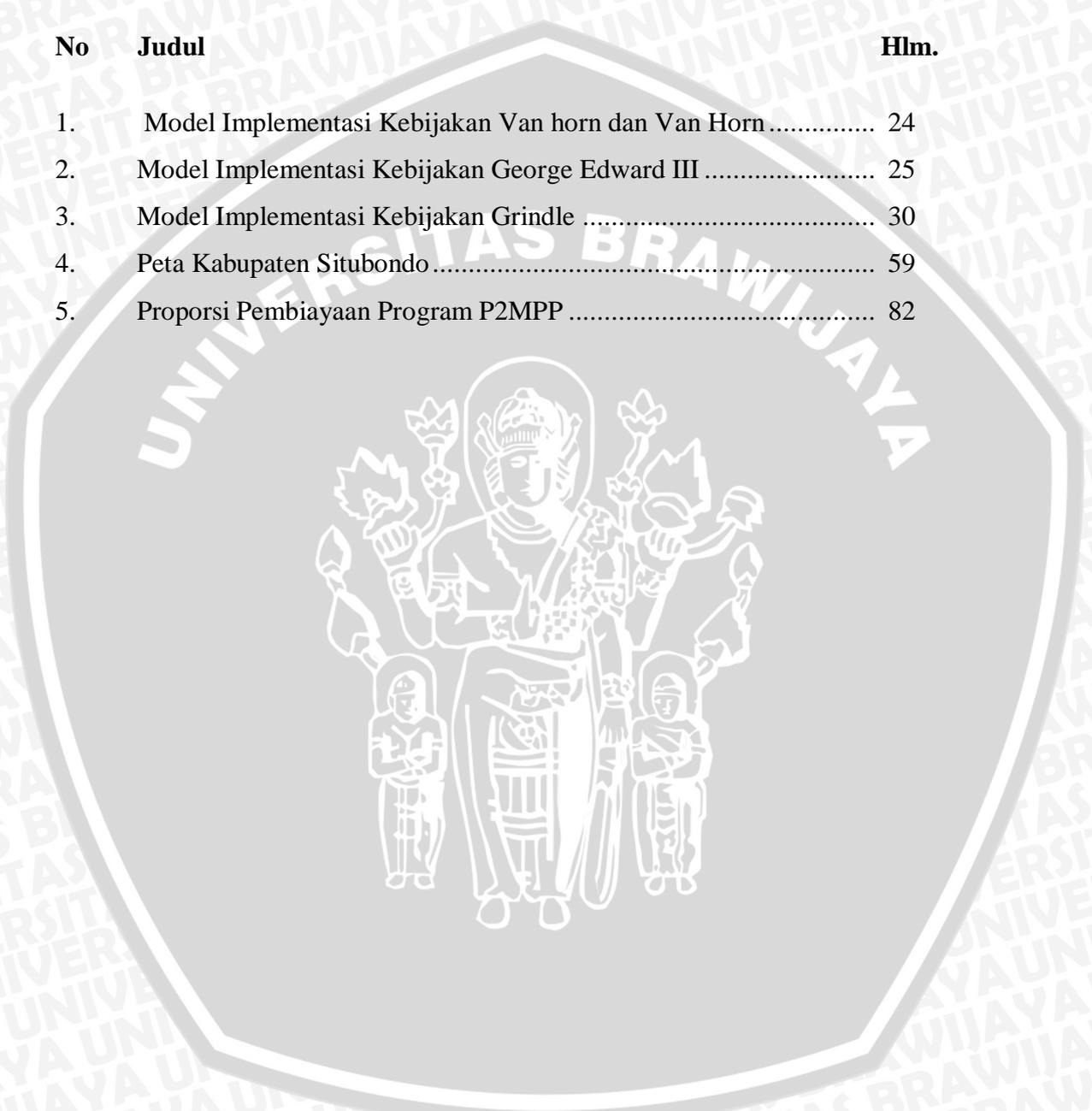
**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Hlm.</b>
1.	Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo .....	59
2.	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo .....	60
3.	Data Mengenai Pembagian menurut Umur dan Jenis Kelamin di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan.....	64
4.	Jumlah Penduduk menurut Usia Kelompok Pendidikan .....	65
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	66
6.	Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat P2MPP.....	85



**DAFTAR GAMBAR / BAGAN**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Hlm.</b>
1.	Model Implementasi Kebijakan Van horn dan Van Horn .....	24
2.	Model Implementasi Kebijakan George Edward III .....	25
3.	Model Implementasi Kebijakan Grindle .....	30
4.	Peta Kabupaten Situbondo .....	59
5.	Proporsi Pembiayaan Program P2MPP .....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

- | No | Judul  |
|----|--|
| 1. | Unit Pengelola Keuangan dan usaha Bina Insan Bahari. |
| 2. | Pengesahan Program P2MPP                             |
| 3. | Surat Perintah Pencairan Dana                        |
| 4. | Laporan Realisasi Penggunaan Dana Belanja Hibah      |
| 5. | Daftar Pengurus UPKu                                 |
| 6. | Daftar Pengawas UPKu                                 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena empirik yang terjadi hampir di semua Negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya alam dan kualitas sumberdaya manusianya yang rendah sehingga produktivitas juga rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan penghasilan yang rendah dan menghasilkan kemiskinan yang terstruktur. Akibatnya masyarakat miskin tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik, kesehatan yang memadai dan nutrisi yang baik. Hal ini menyebabkan kualitas SDM dari segi aspek intelektual dan fisik rendah. Lebih jauh lagi rendahnya kualitas SDM menyebabkan kelompok ini tersisih dari persaingan ekonomi sehingga makin tersisih dari persaingan ekonomi sehingga semakin tidak mampu mendapatkan kesempatan yang baik dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat.

Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya disebabkan dari budaya malas bekerja keras tetapi keseluruhan kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 13,33 persen, lalu pada Maret 2011 tingkat kemiskinan kembali menurun hingga 12,49 persen. Selanjutnya pada periode September 2011 tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 12,36 persen. Sampai dengan September 2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai

28,59 juta jiwa (11,66%). Jumlah ini turun 540.000 jiwa atau 0,30% dari kondisi Maret 2012 yang tercatat sebanyak 29,13 juta jiwa (11,96%). Pada bulan Maret 2013 penduduk miskin di Indonesia kembali menurun menjadi 28,07 juta (11,37%) ([www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)).

Penduduk miskin di Indonesia tersebar tidak merata. Jumlah terbesar dari penduduk miskin sebesar 57,8 persen berada di pulau Jawa. Lalu sebanyak 21 persen di Sumatera, 7,5 persen di Sulawesi, 6,2 persen di Nusa Tenggara, 4,2 persen di Maluku dan Papua dan angka terkecil sebesar 3,4 persen tersebar di Kalimantan. Jumlah penduduk miskin terbesar terletak di pulau Jawa hal ini tidak terlapas karena pulau Jawa memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan pulau lain. Namun, penduduk miskin dengan persentase tertinggi terletak di pulau Maluku dan Papua mencapai yakni 24,14% dari total penduduk di pulau tersebut.

Dalam menanggapi kemiskinan yang terjadi di Indonesia pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan atau program dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang terjadi, diantaranya BLT (Bantuan Langsung tunai), merupakan program kompensasi jangka pendek yang tujuan utamanya menjaga agar tingkat konsumsi rumah tangga yang tergolong sangat miskin *or near poor*, tidak menurun pada saat terjadi kenaikan harga BBM. Dengan demikian, walaupun program BLT bukan satu-satunya program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, namun diharapkan dapat mendorong pengurangan tingkat kemiskinan pada saat terjadi penyesuaian harga-harga kebutuhan pokok menuju keseimbangan yang baru (Departemen Sosial RI, 2008 :5).

BLT tersebut bukannya malah mengurangi masalah krusial kemiskinan di negeri ini. Akan tetapi malah berpotensi menimbulkan masalah baru. *Pertama*, BLT tidak memiliki efektifitas dari segi penyaluran di lapangan. Seringkali tidak tepat sasaran. *Kedua*, *Masalah Sosial* terdapat sebagian masyarakat yang pada akhirnya mengaku miskin karena ingin mendapatkan bantuan. *Ketiga*, BLT ajang peluang korupsi. ([www.lucerahma.blogdetik.com](http://www.lucerahma.blogdetik.com))

Selanjutnya adalah PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Sehingga diharapkan akan menumbuhkan partisipasi, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program PNPM Mandiri ini lebih berhasil dibandingkan dengan pemberian dana BLT dalam penanggulangan kemiskinan. Tidak seperti halnya BLT program PNPM Mandiri ini masih berjalan sampai sekarang. ([www.pnpm-mandiri.org](http://www.pnpm-mandiri.org))

Dalam proses pemberdayaan masyarakat fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator, fungsi utama fasilitator adalah menciptakan lingkungan dimana masyarakat dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilakukan di pusat, daerah kota, maupun daerah pedesaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan

terstruktur telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur dengan program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir. Satu dari sekian banyak program Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang memberi perhatian khusus terhadap upaya pemberdayaan masyarakat pesisir pantai adalah diluncurkannya Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010.

Program tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Wilayah pesisir dan pantai Jawa Timur mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup beragam, diantaranya potensi perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan ikan, pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata pantai. Dalam suatu wilayah pesisir bisa mempunyai potensi alam yang beragam tersebut. Disamping itu, melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) maupun pengembangan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), yang dialokasikan pada 8 Kabupaten, 8 desa pesisir di Jawa Timur. Delapan tempat pelaksanaan program tersebut ialah 1) Kabupaten Malang, Kecamatan Bantur, Desa Sumberbening, 2) Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Paiton, Desa Jabungsisir, 3) Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Rejoso, Desa Jarangan, 4) Kabupaten Tranggalek, Kecamatan Watulimo, Desa Tasikmadu, 5) Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kalidawir, Desa Kalibatur, 6) Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Boncong, 7) Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Kilensari, 8) Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang, Desa Ketapang Daya ([www.bapemas.jatimprov.go.id](http://www.bapemas.jatimprov.go.id)).

Sebagian besar desa yang mendapat program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yaitu desa yang sebagian besar masyarakatnya berada di garis kemiskinan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi. Deskripsi diatas merupakan pusran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia.

Salah satu Desa di Kabupaten Situbondo yang mendapat Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) adalah Desa Kilensari. Desa Kilensari Kecamatan Panarukan merupakan salah satu desa yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Sasaran dari program P2MPP yaitu masyarakat pesisir namun, lebih difokuskan pada nelayan karena mayoritas masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan.

Konsep pemberdayaan masyarakat pesisir pantai yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai (P2MPP) serta adanya pembinaan terhadap masyarakat pesisir pantai di desa tersebut dengan mengkaji bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program tersebut, manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat setempat beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menarik untuk di teliti sebagai

bahan kajian dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan khususnya pembangunan yang berdimensi kerakyatan dimana hasil akhirnya yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu **“Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Kasus pada Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendorong Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

### D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupu secara praktis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis (akademis)

Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP).
2. Aspek Praktis
  - a. Bagi instansi terkait, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan kebijaksanaan terkait dengan pemberdayaan

masyarakat pesisir, sekaligus sebagai sumbangan pikiran terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai.

- b. Sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi bahan studi dalam melakukan penelitian, serta digunakan sebagai sarana pembandingan bagi penelitian-penelitian yang telah maupun yang akan dilakukan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan untuk terdapatnya suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB 2** Tinjauan pustaka, berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi. Disini dijelaskan mengenai administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat serta Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP).

**BAB 3** Metode penelitian, membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

**BAB 4** Hasil dan Pembahasan, berisi tentang penyajian data, analisa dan interpretasi data dala penyajian data, data yang diperoleh dalam penelitian sehubungan dengan permasalahan diungkapkan dan diuraikan. Dalam penyajian data dikemukakan gambaran umum lokasi, yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Situbondo serta keadaan kelautan dan perikanan Kabupaten Situbondo yang mengerucut paga gambaran umum lokasi pelaksanaan Program P2MPP di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, implementasi Program P2MPP yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan sehubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai Kabupaten Situbondo di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, manfaat Program P2MPP oleh masyarakat sasaran program, serta factor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program P2MPP di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

**BAB 5** Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari Hasil penelitian yang dilakukan disertai saran-saran yang diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Situbondo.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

Pentingnya studi administrasi publik, khususnya bagi negara sedang berkembang, tidak ada yang menyangsikan lagi. Diberbagai koran dan majalah banyak dijumpai, betapa kegagalan program pembangunan banyak disebabkan oleh pengabaian terhadap dimensi administrasi publik. Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses di mana sumber daya manusia dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Henry dalam Keban (2004:6) menyatakan bahwa:

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Zauhar (2003:33) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses kerja sama yang berlaku dalam organisasi publik untuk memberikan pelayanan kepada publik. Atau dengan rumusan yang agak spesifik, administrasi publik adalah proses kerja sama dalam suatu organisasi publik untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu, Soempono dalam Thoha (2008:44) menulis bahwa administrasi negara atau *public administration* biasanya yang dimaksud ialah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (*public policy*).

Tjokroamidjojo (1986:3) membagi fungsi dasar administrasi negara menjadi tiga hal, yaitu:

1. Formulasi/perumusan kebijakan.

Mengenai fungsi ini ada empat sub fungsinya ialah:

- a. Kebijaksanaan tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada;
- b. Perumusan kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti/masa depan, dengan cara melakukan perkiraan (*forecast*) dari perkembangan yang mungkin terjadi dan dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan (*alternative courses of action*) yang mungkin dilalui;
- c. Suatu program strategi dan taktik kegiatan-kegiatan yang berdasar poin a dan poin b dapat disusun;
- d. Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan (*decision making*).

Dengan perkataan lain, bagian ini juga disebut perencanaan.

## 2. Pengaturan /pengendalian unsur-unsur administrasi.

Unsur-unsur administrasi ini ialah struktur organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi ialah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut di atas.

## 3. Penggunaan dinamika administrasi

Administrasi publik bisa kita simpulkan sebagai cara atau proses kerja sama para aktor dalam penyelenggaraan Negara. Termasuk dalam hal ini pelaksanaan tugas Negara dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dan segala tindakan Negara tersebut dikenal sebagai kebijakan, yang dijelaskan di bawah ini.

## **B. Kebijakan Publik**

### **1. Konsep Kebijakan Publik**

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” menurut James E. Anderson dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang tokoh (misalnya: seorang pejabat; suatu kelompok; maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wahab, 2004:2). Lebih lanjut Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Wahab, 2004:3). Rumusan ini lebih memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan

pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Lebih lanjut definisi kebijakan menurut Keputusan MENPAN NO: PER/04/M.PAN/4/2007 adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Pendapat ini memusatkan perhatian pada harus adanya sikap patuh dari para pihak terkait terhadap suatu aturan yang telah ditetapkan.

Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan dalam dimensi yang lebih luas yakni suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Wahab, 2004:3). Yang dimaksud Friedrich di sini adalah kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu. Selain itu, yang menjadi penekanan penting dalam definisi kebijakan ini adalah adanya maksud dari suatu tindakan, meskipun maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah tersebut tidak mudah untuk dipahami.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), istilah kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep, keputusan, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya). Sedangkan publik diartikan sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

Dalam kajian kepustakaan banyak sekali pemberian definisi kebijakan publik. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik disampaikan dalam peraturan MENPAN NO: PER/04/M.PAN/4/2007. Sebelumnya dijelaskan bahwa pengertian kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Selanjutnya pengertian publik yaitu hal ihwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Selanjutnya bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat bagi orang banyak.

Pada hakikatnya kebijakan publik mempunyai tujuan yang hendak dicapai seperti yang dikemukakan oleh Chief J. O. Udoji yang dikutip oleh Abdul Wahab, mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Wahab, 2004:5). Definisi senada disampaikan oleh Carl I. Friedrich yang dikutip Nugroho, yang mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Nugroho, 2008:53-54).

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka M. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

1. bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; dan
4. bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat (Islamy, 2007:20).

Di dalam bukunya, Nugroho menarik kesimpulan dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik yang dirasa dapat dijadikan sebagai kebijakan publik ideal yaitu, “kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan” (Nugroho, 2008:55).

Dengan melihat beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa sangat pentingnya kebijakan publik sebagai faktor bagi kemajuan suatu

bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh Nugroho bahwa keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul (Nugroho, 2008:7).

Dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya. Seperti yang dikatakan Nugroho, yang menyebutkan hal ini sebagai konsep *externality* atau dijadikan istilah serapan menjadi eksternalitas. Misalnya, pemerintah membangun jalan raya. Pengguna manfaat bukan hanya pemilik mobil, namun juga masyarakat yang sebelumnya terasing menjadi terbuka, kehidupan ekonomi meningkat sehingga kesejahteraan ikut meningkat, dan seterusnya (Nugroho, 2008:59).

Selanjutnya klasifikasi dari bentuk kebijakan publik sangat banyak, namun menurut Nugroho bisa dikelompokkan menjadi:

1. Kebijakan Publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar yaitu UUD 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah;
2. Kebijakan Publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota; dan
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk

kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota (Nugroho, 2008:62).

## 2. Mekanisme Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah semua keputusan dari pemerintah yang memberi dampak pada kehidupan bersama. Kebijakan publik mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama pada hari ini dan di masa depan.

Kebijakan publik adalah kebijakan untuk publik, yaitu kehidupan bersama, masyarakat, atau siapapun yang menjadi objek kebijakan. Di sini bahwa dalam kebijakan publik terdapat isu kebijakan. Jadi, suatu kebijakan publik harus berisi kepentingan publik. Seperti yang diungkapkan Nugroho, bahwa kebijakan publik dikembangkan dari isu kebijakan, dan bukan hanya dari masalah kebijakan. Isu kebijakan terdiri atas masalah kebijakan (artinya, sudah ada kejadian yang harus diatasi) dan kebutuhan kebijakan (yaitu kebutuhan yang mungkin muncul di masa depan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan publik yang dibuat hari ini) (Nugroho, 2008:292-293).

Sedikitnya ada dua alasan yang dapat dikemukakan mengenai betapa pentingnya isu kebijakan. Pertama, proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu tertentu. Kedua, derajat keterbukaan, yakni tingkat relatif demokratis tidaknya suatu sistem politik, di antaranya dapat diukur dari cara bagaimana mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan publik (Wahab, 2001:38). Ketika semakin

banyak yang menaruh perhatian (*concerned*), maka isu publik beranjak menjadi agenda publik. Yang pada gilirannya akan menyita perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari solusi pemecahan masalah. Hal selanjutnya, memasukkan isu kebijakan ke dalam agenda pembuatan kebijakan publik. Rumusan kebijakan ini akan menjadi aturan bagi seluruh masyarakat yang menjadi objek kebijakan. Tahap selanjutnya yaitu proses pelaksanaan atau sering kita sebut dengan tahap implementasi kebijakan publik oleh pemerintah sendiri ataupun bersama-sama masyarakat. Langkah yang mengikuti tahap di atas adalah tahap evaluasi dan revisi kebijakan.

### **C. Implementasi Kebijakan**

#### **1. Definisi Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan yang kemudian dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi apakah kebijakan tersebut layak ataukah tidak layak sehingga perlu adanya perubahan. Kamus Webster (Wahab, 1991:50) secara singkat merumuskan implementasi yaitu "to implement" (sarana untuk melaksanakan sesuatu), "to give practical effect to" (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Lebih lanjut Wahab (1991:51) dengan mengutip pendapat A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan:

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian".

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan itu sesungguhnya menyangkut tindakan atau perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, maka kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu: 1) Ketaatan target grup; dan 2) Ketaatan para pelaksana.

Pendapat van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Wahab (1991:51) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berdasarkan hal ini, maka ada tiga variabel pokok yang mendapat penekanan dalam proses implementasi, yaitu:

- 1 . Tindakan-tindakan individu/pejabat;
2. Lembaga-lembaga pelaksana;
3. Sasaran/tujuan.

## **2. Langkah-langkah dalam Implementasi Kebijakan**

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, Soenarko (2005: 187) mengatakan ada tiga kegiatan pokok yang penting, yaitu:

### **a. Interpretasi**

Interpretasi dalam implementasi kebijakan adalah usaha untuk membuat agar pelaksana kebijakan mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan, harus direalisasikan. Seperti yang diketahui bersama bahwa lingkungan pembentuk kebijakan (*policy environment*) berbeda dengan

lingkungan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu perlu sekali dalam kegiatan interpretasi ini pelaksana kebijakan dapat menempatkan diri pula sebagai pembuatan kebijakan tersebut. Dengan demikian maka mereka akan memahami apakah dan bagaimanakah yang sesungguhnya dikehendaki oleh pembentuk kebijakan tersebut.

#### b. Organisasi

Organisasi dalam implementasi kebijakan maksudnya adalah pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijakan itu. Hal itu berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan dalam suatu sistem yang direncanakan dengan pembagian tugas dan kewajiban secara efisien. Dengan sistem itulah makna efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat dicapai. Hal tersebut menurut Soenarko disebabkan karena sistem yang baik itu selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Simplicity*, yaitu kewajaran dengan sifat yang sederhana dan mudah untuk diamati dan diikuti.
2. *Accuracy*, yaitu sifat yang urut dan teratur dari rangkaian kegiatan-kegiatan implementasi kebijakan.
3. *Economy*, ialah adanya efisiensi dalam setiap cara dan langkah, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk program pelaksanaan.
4. *Usefulness*, ialah adanya usaha untuk menghindarkan pelaksanaan kebijakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.

Dalam organisasi juga dibutuhkan sistem koordinasi dan pengendalian (control) yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara arah menuju tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

### c. Aplikasi

Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisirnya tujuan suatu kebijakan. Masih mengambil pendapat dari Soenarko yang mengatakan bahwa ada dua bentuk atau gaya dalam aplikasi yakni *programmed implementation* dan *adapted implementation*.

Bergman (Soenarko, 2005:191) mengatakan *programmed implementation* merupakan pelaksanaan kegiatan dalam aplikasi yang mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikemukakan oleh Bergman, bahwa dengan menggunakan bentuk atau gaya tersebut akan dapat diatasi masalah-masalah yang dapat ditimbulkan oleh:

- a. Ketidajelasan tujuan kebijakan yang disebabkan oleh kesalahan pengertian, kekaburan dan lain-lain;
- b. Peran serta dari pelaku-pelaku yang berlebihan jumlahnya;
- c. Keengganan pelaksana, serta tindakan-tindakan yang tidak efektif dan tidak efisien.

Kebalikan dari *programmed implementation* adalah *adaptive implementation*. Soenarko menjelaskan *adaptive implementation* adalah pelaksana kegiatan dalam aplikasi dengan memperhatikan kondisi dan situasi kehidupan

masyarakat yang dikenai kebijakan pada waktunya. Oleh karena itu terjadi perubahan atau modifikasi dari bentuk-bentuk kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 3. Model Implementasi Kebijakan

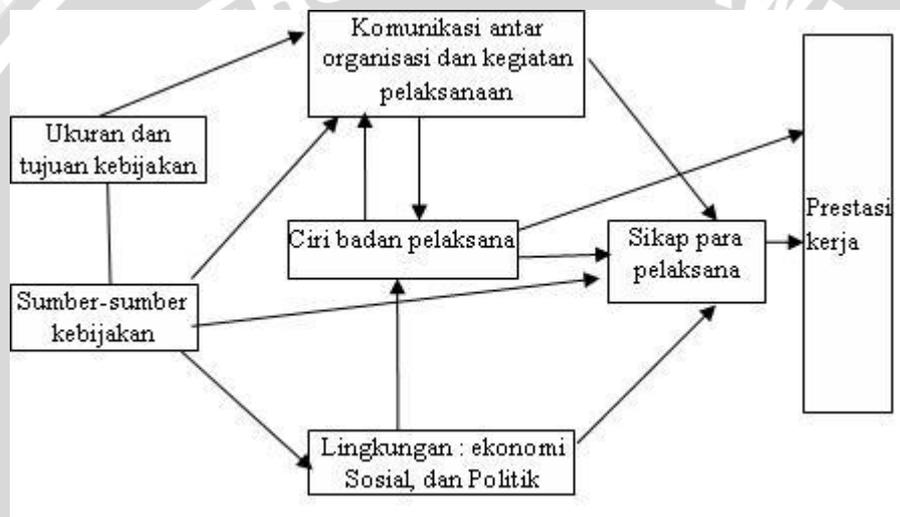
Pada prinsipnya terdapat dua model pendekatan implementasi kebijakan, yakni pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top down* ialah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan ditingkat pusat (Agustino, 2008:140-141). Sedangkan pendekatan *bottom up* menurut Agustino (2008:156-157), adalah model implementasi kebijakan di mana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumber daya yang tersedia di daerahnya.

Berikut ada beberapa model implementasi kebijakan yang dapat digunakan untuk menganalisa implementasi kebijakan diantaranya adalah:

- a. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:144), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu:

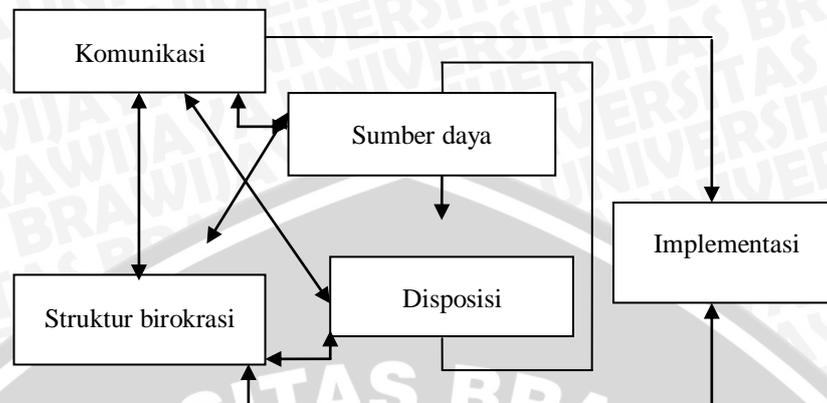
- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan;
- 2) Sumber daya;
- 3) Karakteristik agen pelaksana;
- 4) Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana;
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana;
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.



**Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**  
*Sumber: Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Najam (1995:16)*

b. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward dalam Agustino (2008:149) terdapat empat variabel, yaitu: 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi.



**Gambar 2 Model Implementasi Kebijakan George Edwards**  
*Sumber: George Edwards dalam Agustino (2008:150)*

Keterangan:

George Edward dalam Widodo (2011:98), menyarankan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tadi.

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan

kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang transmisikan kepada para pelaksana, target group, dan pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan publik tersebut. Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

## 2. Sumber daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan (*facility*), sumber daya informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

### a) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya

manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

a) Sumber daya peralatan (*facility*)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

b) Sumber daya informasi dan kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara kewenangan merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

### 3. Disposisi atau sikap

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### 4. Struktur birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisienan struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (*standar operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

### c. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

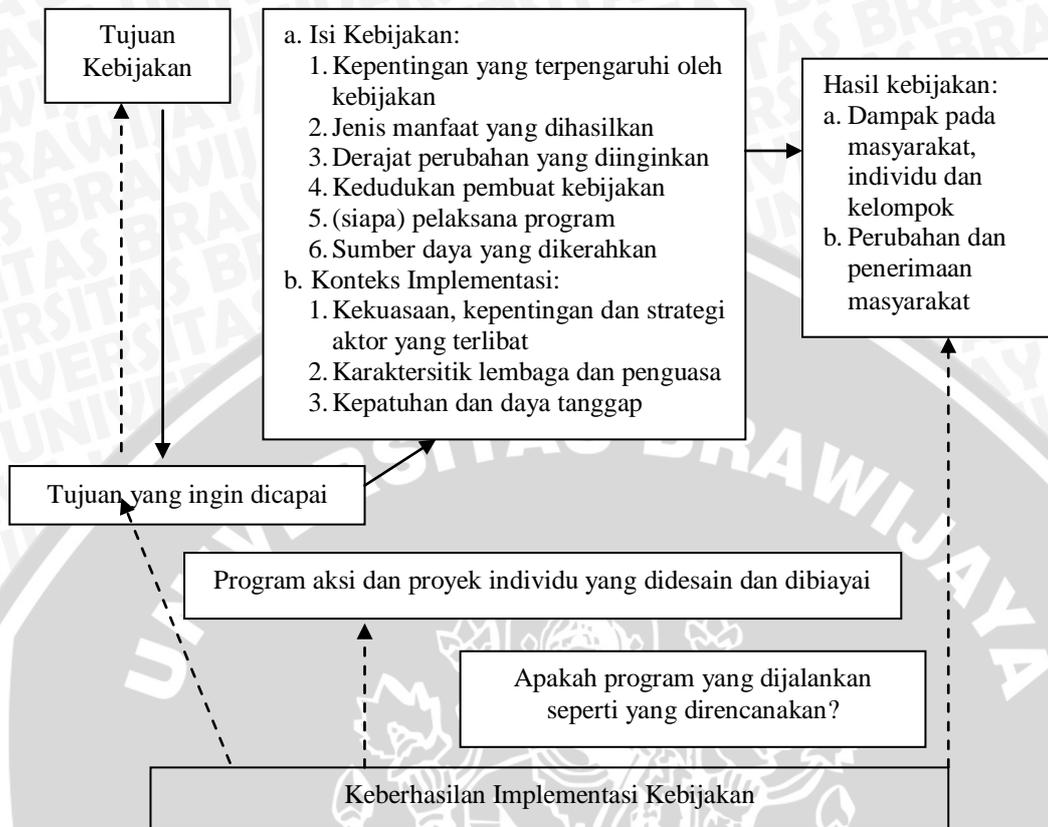
Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Merilee S. Grindle (Agustino, 2008:154) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa item. Disebutkan oleh Agustino (2008:154-155).

Variabel isi kebijakan (*content of policy*) meliputi 6 unsur yaitu:

- 1) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi);
- 2) *Type of benefits* (tipe manfaat);
- 3) *Extent of change envisioned* (derajat perubahan yang ingin dicapai);
- 4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan);
- 5) *Program implementors* (pelaksana program);
- 6) *Resource comitted* (sumber-sumber yang digunakan).

Variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*) meliputi 3 unsur yaitu :

- 1) *Power, interestis, and strategies of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari para aktor yang terlibat);
- 2) *Institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa);
- 3) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).



**Gambar 3 Model Implementasi Kebijakan Grindle**  
*Sumber: Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006:134)*

d. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier.

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier dalam Wahab (1991: 56-57) mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu:

- 1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan
- 2) Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi

- 3) Pengaruh langsung berbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut

#### **D. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat**

##### **1. Pemberdayaan masyarakat**

Menurut Hikmat dalam Prasojo (2004), menggambarkan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.

Menurut Shardlow dalam Prasojo (2004), pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan menurut Wijaya dalam Isfa (2002:103), pemberdayaan adalah upaya pendelegasian kebawah, artinya mengikutsertakan dalam menggali seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada intinya ialah meningkatkan kemampuan masyarakat dan memandirikan masyarakat jadi masyarakat harus berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya agar bisa lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan.

P2MPP merupakan program yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek

yang mandiri yang berperan serta dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan.

Peran serta dan keterlibatan masyarakat tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program-program pembangunan. Dari situ nanti dapat kita lihat bahwa masyarakat sebenarnya memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan melalui P2MPP inilah pengembangan SDM di kecamatan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktu pencapaiannya. Sedangkan sebagai proses. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Dalam pengertian pemberdayaan tidak berfungsi untuk meniadakan masalah, tetapi mempersiapkan struktur dan sistem dalam masyarakat agar proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dari permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

## 2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Setidaknya ada tiga konsep dalam pemberdayaan masyarakat menurut Isfa (2002:103), yaitu antara lain.

- a) *Magical paradigm*, yaitu pemberdayaan sebagaimana aslinya pemberdayaan masyarakat diselaraskan dengan sistem ekonomi, sosial dan politik yang sudah digariskan. Realisasi dari konsep ini adalah merubah sikap mental masyarakat yang tidak berdaya kepada masyarakat yang memerlukan jaminan sosial.

b) *Critical paradigm*, yaitu pemberdayaan yang berkisar di akar. Dalam konsep ini adalah masyarakat dianggap tidak berdaya, hal ini disebabkan karena tatanan ekonomi, sosial politik dan sosial budaya tidak memberikan peluang atau ruang gerak bagi masyarakat lemah.

c) *Naïve paradigm*, yaitu pemberdayaan yang berkisar pada batang. Bahwa tatanan ekonomi, politik, sosial budaya secara umum sudah benar hanya saja praktiknya di lapangan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga diperlukan revisi atau reformasi kebijakan.

Ketiga konsep tersebut paling tidak dapat memberikan arah bagi terwujudnya pemberdayaan masyarakat, karena itu kerancuan dalam memahami konsep tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan tatanan masyarakat itu sendiri.

### 3. Permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Meskipun secara umum terdapat kesepakatan akan pentingnya pemberdayaan masyarakat, namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam proses implementasinya. Permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah :

a) Diskontinuitas dan diskoordinasi

Keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadis. Kebijakan pemerintah kadang berseberangan dengan pendampingan yang dilaksanakan LSM.

b) Disinformasi program

Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan atau konsultan tersebut kadang tidak dapat dipahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksana dari pemberdayaan masyarakat tersebut.

c) Disorientasi

Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya memerlukan waktu yang lama.

d) Generalisasi

Adanya diferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia, maka pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya tidak monolitik.

e) Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional

Berbagai peraturan hukum dan Undang-undang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kaku, yang hanya didasarkan pada surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran juga dapat menghambat dalam pemberdayaan masyarakat.

f) Indikator yang tepat

Pemberdayaan masyarakat selama ini selalu ingin diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses.

Menurut Wiliam dalam Prasojo (2004), pemberdayaan masyarakat menyangkut beberapa aspek antara lain aspek ekonomi, aspek politik, hukum, sosial budaya, maupun ekologi. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan mungkin berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang menyeluruh berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi.

#### **4. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah melalui suatu proses belajar, sehingga menjadi masyarakat yang mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan keamanan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Adapun tahap-tahap dari pemberdayaan masyarakat seperti diungkap oleh Sulistiyani (2004:83), adalah sebagai berikut :

- a) Tahap penyadaran dari pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana pihak pemberdayaan aktor pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan pra kondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap ini transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung

baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya pada tahap ini masyarakat akan mandiri dalam melakukan pembangunan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja.

Definisi pemberdayaan menurut para ahli sangat beragam, namun pada dasarnya pemberdayaan adalah proses memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya sehingga memiliki kekuatan dan mampu untuk hidup mandiri dalam proses yang berkesinambungan. Proses pemberdayaan tidak bisa lepas dari partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan, karena pemberdayaan ini dimaksudkan agar turut aktif dalam proses pembangunan mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, manfaat yang dapat diambil dari pemberdayaan misalnya, antara lain,

- a) Dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan masalah kehidupan mereka.
- b) Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat sebagai landasan bagi pendidikan demokrasi.
- c) Dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam menangani urusan-urusan publik akan memperkuat solidaritas komunitas masyarakat lokal.

### **5. Partisipasi Masyarakat**

Rumusan pengertian partisipasi sangat bervariasi, hal ini dikarenakan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Mikkeisen dalam Soetomo (2006:438) menginventarisasi adanya enam tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi.

- a) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b) Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemanusiaan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c) Partisipasi adalah proyek yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

- d) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan. Pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- e) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- f) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Berdasarkan beberapa pengertian partisipasi tersebut menunjukkan bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan tersebut. Namun apabila latar belakang yang mendorong partisipasi, maka partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi (hal-hal yang menentukan) dan kesadarannya tentang arti keterlibatan oleh determinasi dan kesadaran, maka tidak termasuk dalam kategori partisipasi melainkan lebih tepat disebut mobilitasi.

Pengertian partisipasi masyarakat yang sesuai dengan pembangunan adalah keseluruhan proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program serta evaluasi dan menikmati hasil.

## 6. Partisipasi dalam Pemberdayaan

Partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama melalui aktivitas lokal dapat menyebabkan terjadinya proses belajar sosial yang kemudian dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik dalam tindakan bersama dan aktivitas lokal selanjutnya. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan, di lain pihak dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil apabila dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan yang juga merupakan pencerminan bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih memfokuskan perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya bukan semata-mata pada hasil secara fisik material.

Faktor struktural dan kultural masyarakat perlu dipertimbangkan dalam mendorong munculnya partisipasi masyarakat terutama dalam proses pengambilan keputusan. Apabila ide, pendapat, dan usulan dari masyarakat biasanya tidak muncul dalam forum yang juga dihadiri oleh pimpinan dan elit lokal. Bukan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai ide dan aspirasi, tetapi lebih dikarenakan suasana struktural cenderung mendorong mereka mengikuti dan menyetujui apa yang sudah disampaikan oleh elit dan pimpinannya. Oleh sebab itu dibutuhkan proses belajar sosial. Dimana dalam proses ini pada tingkat masyarakat lokal agar bersedia mengurangi dominasinya dan dari masyarakat agar belajar untuk berani mengungkapkan aspirasinya meskipun berada dengan elitnya.

Secara normatif asumsi yang mendasari bahwa diperlukan adanya partisipasi masyarakat yaitu bahwa masyarakat lokal harus memperoleh proyek

dan program pembangunan yang mereka tentukan sendiri. Asumsi normatif ini didasari oleh asumsi deduktif bahwa masyarakat lokal yang paling tahu apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya dan mereka memiliki hak dan kemampuan untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya tadi. Dengan demikian, apabila program tersebut akan lebih relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.

Asumsi normatif dan asumsi deduktif tersebut kemudian dapat dilanjutkan dengan pengembangan asumsi teoritik yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Beberapa asumsi teoritik yang dikembangkan Mikkelsen dalam Soetomo (2006: 480) adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antar kelompok-kelompok masyarakat dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat setempat adalah mungkin.
- b) Pembangunan menjadi positif apabila ada partisipasi dari masyarakat. Asumsi ini ingin menempatkan partisipasi masyarakat sebagai saran sekaligus tujuan dari proses pembangunan.
- c) Pemberdayaan masyarakat mutlak perlu mendapatkan partisipasinya. Karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk program pembangunan yang ditetapkan masyarakat . kecuali masyarakat itu sendiri yang mempunyai kemampuan untuk memaksa pemerintahannya
- d) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti ada penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat itu sendiri, dan secara eksternal terhadap pemerintahan atau pelaksana program.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat disebabkan oleh adanya struktur sosial yang tidak memungkinkan masyarakat berpartisipasi. Hambatan struktural yang seiring termanifestasikan dalam bentuk konflik kepentingan perlu diatasi melalui musyawarah mufakat atau menghilangkan struktur sosial yang menghambat melalui reformasi struktural. Berbagai asumsi tersebut dapat digunakan sebagai landasan berfikir untuk mengembangkan strategi pembangunan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

#### **E. Kemiskinan**

Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehidupan terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Menurut Suryono (2004:100) mengatakan bahwa kemiskinan adalah sebagai ketidakmampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya dan ditandai oleh indikator pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial. Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004: 27) kemiskinan dilihat dari sisi poverty profile masyarakat, kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (welfare) semata; tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan (powerless), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

Suharto (2005:132) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri, diantaranya:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Lebih lanjut Dewanta dalam Suryono (2004:101) mengidentifikasi beberapa penyebab orang menjadi miskin antara lain (1) karena perbedaan akses ekonomi yang dimiliki; (2) ketidakberuntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin; (3) ketimpangan distribusi; (4) pembangunan analog sebagai ideology; (5) Strategi Pembangunan dan industrialisasi, dan (6) intervensi pemerintah (sebagai eksekutor-pen).

Dengan kata lain, menurut Siagian (2005:80) bahwa penduduk miskin dihadapkan pada "lingkaran setan" yang mengandung komponen :

1. Pendapatan perkapita rendah.
2. Yang berakibat pada ketidakmampuan menabung.
3. Yang pada gilirannya berakibat pada tidak adanya investasi.
4. Tidak adanya investasi berarti tidak adanya perluasan usaha.
5. Tidak adanya perluasan usaha berarti makin sempitnya kesempatan kerja.
6. Sempitnya lapangan kerja berarti tidak adanya penghasilan.
7. Tidak adanya penghasilan berakibat pada tidak bergesemnya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.

Lebih lanjut disimpulkan bahwa pada dasarnya kemiskinan suatu proses panjang yang melibatkan adanya interaksi berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya. Kemiskinan muncul bukan sebagai sebab namun lebih sebagai akibat dari adanya situasi ketidakadilan, ketimpangan dan ketergantungan dalam struktur masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan keterbelakangan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mensejahterakan hidup mereka.

Menurut Boeke dalam Siswanto (2008:19) proses kemiskinan di Negara berkembang khususnya keterkaitannya dengan proses pembangunan di Negara maju bisa dilacak dari aktivitas ekonomi pedesaan, yang merupakan sentra aktivitas ekonomi di negara berkembang. Pedesaan di Dunia Ketiga lazim dideskripsikan sebagai tempat bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas

termasuk perikanan, kehutanan, dan lain-lain). Desa adalah suatu masyarakat para petani yang mencukupi hidup sendiri (swasembada).

Menurut Kusnadi (2006:24) kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu:

- 1) Kemiskinan struktural, kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam.
- 2) Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Variabel-variabel superstruktur tersebut diantaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super-struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya.
- 3) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan.

Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya" kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan.

Bertolak dari pernyataan diatas Firth dalam Kusnadi (2004:29) kemiskinan nelayan dicirikan oleh lima karakteristik yaitu :

- 1) Pendapatan nelayan bersifat harian (daily increments) dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu, pendapatannya juga sangat bergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri, dalam arti ia sebagai juragan (nelayan pemilik alat produksi) atau pondega (nelayan buruh). Dengan pendapatan yang bersifat harian, tidak dapat ditentukan, dan sangat tergantung pada musim, mereka (khususnya nelayan pandega) sangat sulit dalam merencanakan penggunaan pendapatannya. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk membelanjakan uangnya segera setelah mendapat penghasilan. Implikasinya, nelayan sulit untuk mengakumulasikan modal atau menabung.
- 2) Dilihat dari pendidikannya, tingkat pendidikan nelayan atau anak-anak nelayan pada umumnya rendah. Kondisi demikian mempersulit mereka dalam memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan.
- 3) Dihubungkan dengan sifat produk yang dihasilkan oleh nelayan, maka nelayan lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan merupakan makanan pokok. Selain itu, sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan, menimbulkan

ketergantungan yang besar dari nelayan kepada pedagang. Hal ini menyebabkan harga ikan dari nelayan dikuasai oleh pedagang.

- 4) Bidang perikanan membutuhkan investasi cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu, nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan tangkap yang sederhana ataupun hanya menjadi anak buah kapal (ABK).
- 5) Kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan oleh terbatasnya anggota keluarga yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada satu mata pencaharian yaitu menangkap ikan. Demikian pula, dalam kegiatan pemasaran dan pengolahannya, karena umumnya hasil laut tersebut langsung dijual kepada pedagang tanpa melalui pengolahan. Kondisi wilayah pesisir yang umumnya gersang juga mengurangi kesempatan mereka untuk membuka lapangan kerja dan mengembangkan usaha sektor lainnya.

#### **F. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)**

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), yang dialokasikan pada 8 Kabupaten, 8 desa pesisir di Jawa Timur.

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan RTM maupun pengembangan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai. Dalam implementasinya, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumberdaya, diperlukan sebagai fasilitator dan mediator bagi pengembangan akses dan kerjasama dalam mengembangkan potensi pesisir dan pantai untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai mempunyai prioritas program yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs 2015, khususnya dibidang perekonomian masyarakat perdesaan, dengan mengacu pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah pesisir dan pantai dengan mengusung prinsip pada pembangunan manusia, keberpihakan terhadap orang miskin, transparansi,

partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari & berkelanjutan.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Pembuatan rancangan penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah. Suatu penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada, oleh karena itu metode diperlukan dalam suatu penelitian.

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir yang disiapkan untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan fakta-fakta tentang manusia, alam dan hubungan satu dengan yang lain guna untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, suatu situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan mendiskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54).

Pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut bogdan dan taylor dalam (Moleong, 2000:4) mendefinisikan “Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis

maupun lisan dan orang-orang atau perilaku yang diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh)”. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Menurut Hasan (2002:22) metode deskriptif melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Tujuan menggunakan penelitian deskriptif yaitu :

- a. Menyimpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada;
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku;
- c. Membuat perbandingan atau evaluasi;
- d. Menentukan apa yang dilakukan orang dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan yang akan datang.

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena pertimbangan bahwa peneliti ingin memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Dengan demikian penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut tentang implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yang dilaksanakan di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

## B. Fokus Penelitian

Fokus menurut Moleong (2000:62) sangat diperlukan dalam kegiatan penelitian, karena dalam penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan:

- 1) Penetapan fokus penelitian akan membatasi *study* yang akan diteliti oleh peneliti.
- 2) Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu info yang diperoleh dari lapangan.

Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data atau info apa yang dikumpulkan dan data atau info mana yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sudah dikumpulkan.

Dalam kaitan ini, sasaran atau fokus yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas tentang implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP). Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) oleh Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, yang meliputi:
  - a. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP).
  - b. Proses Pelaksanaan Kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), meliputi :

- 1). Tahap Persiapan dan sosialisasi;  
(Komunikasi dan sumber daya)
- 2). Tahap Pengeloaan Dana P2MPP;  
(Sumber daya anggaran)

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP).

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo karena desa tersebut merupakan salah satu desa di wilayah pesisir Situbondo yang memiliki potensi alam yang beraneka ragam. Desa Kilensari juga terkenal sebagai salah satu pemasok ikan terbesar di Situbondo.

Adapun yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian yang ingin di teliti. Sedangkan yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kantor Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- 2) Kantor Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, Situbondo.

#### D. Sumber dan Jenis Data

Menurut pendapat Lofland dalam (Moleong, 2006: 157) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan kajian untuk mengetahui apa yang kita teliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu:

##### 1. Informan

Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak di dalam lingkungan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan pihak lain yang dapat memberi informasi terkait dengan implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Kabupaten Situbondo.

##### 2. Dokumen

Data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data ini merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi semisal skema dan bagan keorganisasian, peraturan-peraturan yang tertulis yakni seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dan peraturan-peraturan

lain yang bersangkutan ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini.

Sedangkan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pernyataan langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara oleh penulis dengan pihak yang memiliki kewenangan, yakni :

- a. Kepala Desa Kilensari;
- b. Ketua UPKu Bina Insan Bahari
- c. Masyarakat sasaran Program P2MPP.

#### 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini pada Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan, alasan-alasannya adalah antara lain karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data di lapangan. Untuk itu metode atau cara pengumpulan data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapun metode dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Studi Literatur

Dalam studi literatur ini data diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian, makalah-makalah, majalah dan surat kabar referensi atau rujukan dari penelitian sebelumnya mengenai peristilahan, kerangka pemikiran dan teori yang ada serta relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

#### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka (*Face to Face*) secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab, baik dengan responden maupun dengan pihak-pihak yang terkait lainnya. Guna memperoleh informasi atau data secara jelas dan mendasar, juga untuk menjalin hubungan dengan partisipan agar memperlancar dalam proses penelitian.

#### 3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat serta mempelajari data dari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di lokasi penelitian yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

## F. Instrumen Penelitian

### 1. Peneliti Sendiri

Salah satu ciri peneliti kualitatif adalah memasukan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini berpengaruh terutama dalam proses wawancara dan analisa data.

### 2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*)

Yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian dan biasanya digunakan oleh peneliti sebagai kerangka dasar dalam mengadakan wawancara dengan aktor yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini. Informan yang dimaksud disini yaitu Kepala kantor Kecamatan Panarukan, Kepala Desa Kilensari Panarukan, Masyarakat sasaran Program P2MPP.

### 3. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Yaitu merupakan catatan untuk mencatat hasil-hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

## G. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2008:88): “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”

Analisis data dalam penelitian adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

dengan cara mengelompokkan data ke dalam pola, dengan memilih data dan kemudian membuat suatu kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain.

Alur kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data, yaitu data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

2. Reduksi data,

Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan pengolahan data, mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu (Bungin dalam Sugiyono, 2008:93). Dengan kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemilahan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian data, tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian data ini kita akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

4. Penarikan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti

berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang diperoleh. Sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan pengolahan data yang telah diperoleh.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran umum Kabupaten Situbondo

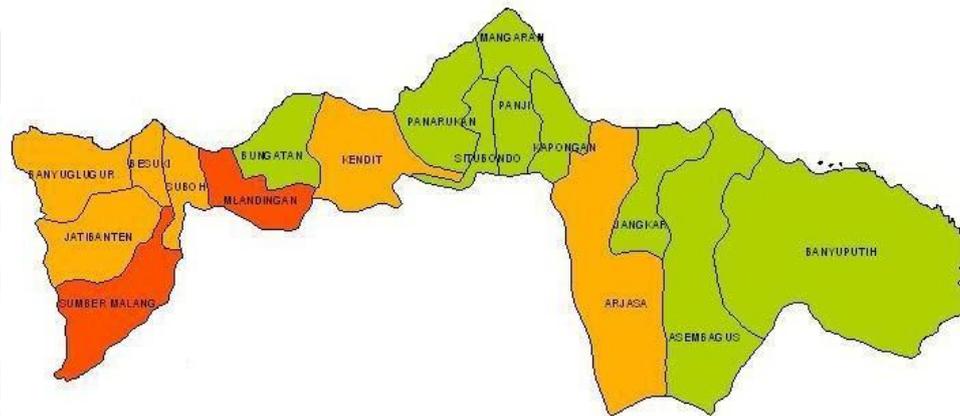
Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pasir Putih yang terletak di posisi antara  $7^{\circ} 35' - 7^{\circ} 44'$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 30' - 114^{\circ} 42'$  Bujur Timur. Suatu tempat rekreasi pantai yang berjarak kurang lebih 23 km disebelah barat Situbondo. Pasir Putih terkenal dengan pantainya yang landai dan berpasir putih, pada tahun 1960-1970 an masih banyak habitat laut yang bisa ditemukan dipantai ini. Kuda laut dan batu karang cantik berwarna warni banyak dijual di akuarium penjual ikan hias setempat. Namun kini makhluk tersebut tidak dapat ditemui lagi. Kabupaten Situbondo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km<sup>2</sup> atau 163.850 hektar, dan bentuknya memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km. Pantai utara umumnya merupakan dataran rendah dan di sebelah selatan merupakan dataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah kurang lebih 11 km. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)
1	Sumbermalang	129,47
2	Jatibanteng	66,08
3	Banyuglugur	72,99
4	Besuki	26,08
5	Suboh	30,84
6	Mlandingan	39,60
7	Bungatan	66,07
8	Kendit	114,14
9	Panarukan	54,55
10	Situbondo	27,57
11	Mangaran	35,70
12	Panji	46,99
13	Kapongan	44,54
14	Arjasa	216,38
15	Jangkar	67,00
16	Asembagus	118,74
17	Banyuputih	481,67
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,638,41</b>

Sumber : BPS kabupaten Situbondo Tahun 2006



Sumber: BPS Kabupaten Situbondo 2013

Gambar 4. Peta Kabupaten Situbondo

Dari 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, 14 kecamatan diantaranya memiliki pantai dan 3 kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang,

Jatibanteng dan Panji. Secara administratif Kabupaten Situbondo dibagi atas 4 wilayah kerja Pembantu Bupati (wedana-pen), 17 kecamatan. 5 wakil kecamatan, 4 kelurahan, 131 desa, 630 dusun, 651 lingkungan, 1.289 Rukun Warga (RW), dan 3.282 Rukun Tetangga (RT). Jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Panji, yaitu sebanyak 12 desa dan yang paling sedikit jumlah desa di Kecamatan Banyuputih, yaitu sebanyak 5 desa. Sedangkan 4 kelurahan berada di Kecamatan Situbondo (2 kelurahan) dan Kecamatan Panji (2 kelurahan).

Tabel 2 Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin Kabupaten Situbondo

Kecamatan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Sumbermalang	12.857	13.642	26.499
Jatibanteng	10.584	11.435	22.019
Banyuglugur	11.033	11.781	22.814
Besuki	30.317	31.979	62.296
Suboh	12.913	13.625	26.538
Mlandingan	10.903	11.669	22.572
Bungatan	11.866	12.864	24.730
Kendit	13.846	14.592	28.438
Panarukan	26.477	27.543	54.020
Situbondo	23.079	24.382	47.461
Mangaran	15.623	16.718	32.341
Panji	33.715	35.873	69.588
Kapongan	18.172	19.377	37.509
Arjasa	19.709	20.437	40.146
Jangkar	17.899	18.785	36.684
Asembagus	23.328	24.392	47.720
Banyuputih	27.332	27.984	55.316
<b>Jumlah 2012</b>	<b>319.653</b>	<b>337.038</b>	<b>656.691</b>
<b>Jumlah 2011</b>	<b>318.157</b>	<b>333.885</b>	<b>652.042</b>
<b>Jumlah 2010</b>	<b>315.912</b>	<b>331.707</b>	<b>647.619</b>
<b>Jumlah 2009</b>	<b>313.661</b>	<b>329.400</b>	<b>643.061</b>
<b>Jumlah 2008</b>	<b>312.394</b>	<b>328.488</b>	<b>640.882</b>

Sumber : BPS Kabupaten Situbondo tahun 2013

Dari tabel diatas Kabupaten Situbondo selalu mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Dari jumlah penduduk yang tersebar di 17 kecamatan, dapat dilihat lima urutan terpadat atau terbanyak masing-masing adalah Kecamatan Panji 69.588 jiwa, Kecamatan Besuki 62.296 jiwa Kecamatan Banyuputih 55.316 jiwa, Kecamatan Panarukan 54.020 jiwa dan kecamatan Situbondo 47.720 jiwa.

Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Situbondo banyak berasal dari etnis Jawa dan Madura, walaupun banyak juga suku bangsa lain yang hidup berdampingan seperti Tionghoa. Mata pencaharian terbesar berasal dari sektor pertanian, tapi untuk beberapa wilayah yang berbatasan dengan Selat Madura dan Selat Bali memiliki potensi yang bagus di bidang kelautan. Mengingat penduduk yang tinggal di wilayah pantai memiliki garis pantai sepanjang 150 Km, hal ini memberikan mata pencaharian bagi penduduk Situbondo dalam hal penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut.

Selain sektor pertanian dan perikanan, sektor pariwisata juga merupakan potensi tersendiri bagi Situbondo. Hal ini kembali ke letak strategis Situbondo yang berbatasan langsung dengan garis pantai, dan kawasan hutan lindung yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang.

#### **a. Visi dan Misi Kabupaten Situbondo**

##### **1. Visi**

Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Agamis, Demokratis, Berkualitas, Berpola Pikir Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan Serta Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## 2. Misi

- a) Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
- b) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- c) Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis
- d) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
([www.situbondokab.go.id](http://www.situbondokab.go.id))

## 2. Gambaran umum Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

### a. Sejarah Singkat

Panarukan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Nama Panarukan yang dahulu dieja *Panaroeccan* dikenal terutama sebagai ujung timur Jalan Raya Pos atau *Grote Postweg* yang dibangun Gubernur Jenderal Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu. Kota Situbondo sendiri di masa lampau kalah penting peranannya dibanding dengan Panarukan yang menjadi salah satu pelabuhan penting di ujung timur Jawa Timur. Namun dalam perkembangannya, kota Situbondo lebih cepat tumbuh dan berkembang dibanding Panarukan. Panarukan sendiri terdiri dari delapan desa, yaitu Desa Kilensari, Desa Wringin Anom, Desa Paowan, Desa Sumberkolak, Desa Peleyan, Desa Duwet, Desa Alasmalang, dan Desa Gelung. Total luas wilayah Kecamatan Panarukan adalah 54,55 km<sup>2</sup>.

Kecamatan Panarukan merupakan daerah pesisir di wilayah Kabupaten Situbondo. Dari delapan desa yang ada di kecamatan Panarukan, tiga diantaranya memiliki wilayah pantai yaitu Pantai Panarukan di Desa Kilensari, Pantai Pathek di Desa Gelung, dan Pantai Berigheen di Desa Peleyan. Pantai tersebut dikelola menjadi tempat pariwisata dan kegiatan perdagangan. Pantai yang menjadi tempat pariwisata adalah pantai Pathek dan Pantai Berigheen. Ditandai dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang pariwisata seperti penginapan, rumah makan, dan area pemancing ikan. Sedangkan pantai yang dikelola untuk kegiatan perdagangan adalah pantai yang berada di Desa Kilensari. Desa Kilensari juga menjadi pusat pemerintahan di Kecamatan Panarukan. ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org))

Desa Kilensari memiliki batas-batas :

- Utara : Selat Madura
- Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi
- Barat : Kabupaten Probolinggo
- Timur : Selat Bali

#### **b. Keadaan Penduduk**

Dari hasil penelitian mayoritas penduduk di Desa Kilensari ini bersuku Madura dan sebagian lainnya dari suku Jawa. Jumlah penduduk Desa Kilensari tercatat pada tahun 2013 sebanyak 12.684 jiwa yang terdiri dari 3.835 kepala keluarga. Sedangkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, laki-laki sebanyak 6.241 jiwa dan perempuan sebanyak 6.443 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.236 per KM. Data mengenai pembagian penduduk menurut umur

dan jenis kelamin di Desa Kilensari tahun 2013, dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 Pembagian Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Tidak Produktif (<14)	1.740	1.852	3.592
2.	Produktif (15-60)	4.112	4.235	8.347
3.	Tidak Produktif (>60)	389	356	745
	Jumlah	6.241	6.443	12.684

Sumber : Kantor Desa Kilensari 2013

Dari hasil perhitungan diatas diketahui produktifitas penduduk Desa Kilensari masih tinggi yaitu sebesar 8.347 orang karena termasuk dalam usia produktif. Dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja yang produktif cukup memadai. Dari usia produktif tersebut sebagian besar bermata pencaharian nelayan, dan sebagian lainnya adalah pegawai negeri sipil dan petani. Karena mayoritas penduduk Desa Kilensari bermata pencaharian sebagai nelayan. Mayoritas penduduk di Desa Kilensari adalah pemeluk agama islam Sebanyak 12.576 orang dan sebagian kecil lainnya pemeluk agama Kristen, katolik dan konghucu.

### c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Kilensari Kecamatan Panarukan bisa dibilang cukup maju. Sarana dan prasarana pendidikan umum di Desa Kilensari diantaranya 2 unit gedung Play Group, 2 unit gedung Taman Kanak-kanak, 1 unit gedung Sekolah Dasar, dan 2 unit gedung Sekolah Menengah Pertama (MTS)

merupakan kepemilikan swasta. Sedangkan sarana dan prasarana pendidikan umum di Desa Kilensari yang merupakan kepemilikan pemerintah diantaranya 8 unit gedung Sekolah Dasar, 1 unit gedung Sekolah Menengah Pertama dan 1 unit gedung Sekolah Menengah Atas. Jumlah penduduk menurut usia kelompok pendidikan tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan

NO	Kelompok Pendidikan	Usia (Tahun)	Jumlah (orang)
1	Taman Kanak-Kanak	3-6	241
2	SD-SMP/ sederajat-SMA/ sederajat	7-18	2.951
3	Tamat SD	18-56	1928
4	Tamat S1/ sederajat	23-56	167
5	Tamat S2/ sederajat	25-56	8

Sumber: Kantor Desa Kilensari, 2013

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Kilansari bisa dibilang cukup bagus. Sebagian penduduk Desa Kilensari mampu tamat S1 dan S2. Ini tidak terlepas dari letak Desa kilensari yang berdekatan dengan Kota Situbondo yang memungkinkan penduduk Desa Kilensari menimba ilmu di Kota Situbondo yang sarana dan prasarana pendidikannya lebih lengkap. Dari tabel diatas untuk penduduk yang hanya mampu tamat Sekolah Dasar sebagian besar adalah nelayan.

#### d. Mata Pencaharian

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Nelayan	680
2	Petani	440
3	Buruh Tani	155
4	PNS	486
5	Pengrajin industry rumah tangga	565
6	Pedagang keliling	79
7	Peternak	272
8	Montir	20

Sumber: Kantor Desa Kilensari

Mata pencaharian penduduk Desa Kilensari Kecamatan Panarukan bervariasi. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagian lainnya bekerja sebagai PNS, petani, buruh tani, pengrajin, pedagang, peternak dan montir. Sumber penghasilan terbesar masyarakat adalah pada bidang perikanan, karena memang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Mengingat terbatasnya baik ukuran maupun teknologi perahu yang dimiliki nelayan, maka aktifitas penangkapan nelayan masih tergantung pada musim dan kondisi oseanografi perairan laut setempat. Hal ini menyebabkan kegiatan usaha penangkapan ikan tidak kontinyu, terbatasnya kemampuan menjangkau daerah operasi penangkapan dan berskala kecil.

#### e. Fasilitas Desa

Fasilitas yang terdapat di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan yaitu :

1. Fasilitas kesehatan yaitu terdapat sebuah puskesmas.
2. Fasilitas perdagangan yaitu pasar di Desa Kilensari yang menyediakan kebutuhan primer dan sekunder. Di daerah pesisir juga terdapat pelelangan ikan yang menyediakan ikan-ikan segar yang baru ditangkap dan harganya lebih murah.
3. Yayasan Panti Asuhan Al-Islah dan Tunas harapan yang menampung anak-anak yatim piatu di Desa Kilensari dan sekitarnya.
4. Jaringan listrik, air dan telepon:
  - a. Jaringan listrik PLN sudah menjangkau seluruh dusun.
  - b. Jaringan air minum dikelola PDAM guna melayani warga di Desa Kilensari dengan memanfaatkan aliran sungai sampean.
  - c. Jaringan telepon kabel sudah menjangkau seluruh dusun. Begitu juga dengan mobile phone sudah tersedia tower-tower sehingga bagi penggunaannya dapat dengan mudah berkomunikasi.

## **B. Data Fokus**

### **1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) oleh Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.**

Wilayah pesisir dan pantai Jawa Timur mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup beragam, diantaranya potensi perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan ikan, pertanian perkebunan, peternakan dan wisata pantai.

Namun dibalik kekayaan potensi sumberdaya alam tersebut wilayah pesisir dan pantai mempunyai beragam permasalahan yang mendasar yaitu sumberdaya manusianya masih marginal terutama dibidang pendidikan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pantai masih relative sangat tertinggal. Apabila dibandingkan antara sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah pesisir dan pantai sangatlah tidak seimbang, seharusnya masyarakat pesisir lebih sejahtera bila dibandingkan dengan fakta yang ada sekarang ini. Banyak factor yang menyebabkan kemiskinan di wilayah pesisir dan kesejahteraan masyarakat tidak merata, salah satunya adalah keberdayaan masyarakat yang masih minim apabila dibandingkan dengan wilayah non pesisir.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, maka pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir dan pantai. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai dikelola secara terpadu

dengan membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam rangka memfasilitasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) kategori hampir miskin dan miskin maupun pengembangan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai. Dalam pelaksanaannya, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumberdaya, diperlukan sebagai fasilitator dan mediator bagi pengembangan akses dan kerjasama dalam mengembangkan potensi pesisir dan pantai untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai mempunyai prioritas program yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs 2015, khususnya dibidang perekonomian masyarakat pedesaan, dengan mengacu pada potensi dan permasalahan yang ada di pesisir dan pantai dengan mengusung prinsip pada pembangunan manusia, keterpihakan terhadap orang miskin, transparansi, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan.

**a. Pihak-Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai, diantaranya :**

**1) UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan usaha)**

Dalam rangka mengoptimalkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkesinambungan. Keterpaduan diwujudkan melalui pemantapan pola kemitraan dan sharing

pendanaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota maupun *stakeholders* lainnya. Sedangkan kesinambungan diwujudkan melalui pengembangan pola penanganan program yang dimulai dari Tahap Awal yang dilanjutkan dengan Tahap Penguatan dan Tahap Pemandirian secara *multi years/berkesinambungan*.

Salah satu pola pemberdayaan masyarakat yang selama ini dikembangkan adalah melalui pemberdayaan Unit Pengelolaan Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai instrumen yang memberikan pelayanan pinjaman permodalan kepada Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP). UPKu dalam hal ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan permodalan baik pada kelompok maupun RTM secara perorangan yang akan memulai maupun melanjutkan usahanya dalam rangka peningkatan pendapatan (*income generating*). Dalam rangka mengoptimalkan peran UPKu sebagai instrumen pemberdayaan usaha dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin maka dilakukan kegiatan Pemberdayaan UPKu. ([www.bapemas.jatimprov.go.id](http://www.bapemas.jatimprov.go.id))

Secara umum Pemberdayaan UPKu bertujuan untuk meningkatkan kinerja UPKu dalam memberikan pelayanan permodalan bagi RTM secara mudah, murah dan cepat serta pengembangan ekonomi produktif masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan UPKu agar berfungsi dan berperan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun lembaga pelayanan keuangan mikro di Desa/ Kelurahan.

2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha bagi RTM anggota Pokmas UEP dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.
3. Mengembangkan usaha layanan sosial melalui sistem keterjaminan sosial bagi RTM kategori sangat miskin.
4. Mengembangkan jaringan usaha ekonomi dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan perekonomian perdesaan.

Jenis pelayanan/produk pelayanan pemberdayaan masyarakat berupa Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai salah satu jenis pelayanan di Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat. Ruang lingkup pelayanan meliputi pemberdayaan UPKu, pemberdayaan pokmas UEP dan pendampingan.

a. Pemberdayaan UPKu, meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPKu ; Peningkatan kapasitas kelembagaan UPKu di arahkan pada kegiatan fasilitasi yang bertujuan untuk pembenahan : (i) struktur dan personalia pengurus, (ii) penyempurnaan AD/ART, (iii) peningkatan kapasitas manajemen organisasi, (iv) peningkatan legalitas lembaga UPKu (v) Jaringan kerja sama antar UPKu.
2. Peningkatan Kapasitas SDM; tujuan utama dalam peningkatan Kapasitas SDM adalah menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pengurus UPKu dan Pokmas.
3. Pengembangan Usaha UPKu; pengembangan usaha UPKu merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja usaha UPKu yang meliputi : (i) usaha

simpan pinjam, (ii) usaha sektor riil, dan (iii) kemitraan dengan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif.

4. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha UPKu; pengembangan sarana prasarana UPKu dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan fisik organisasi yang menjadi prioritas kebutuhan dalam mendukung operasionalisasi kegiatan usaha dan kinerja UPKu.

5. Pengembangan Sistem Keterjaminan Sosial melalui UPKu; kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan UPKu dalam membangun sistem keterjaminan sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan melalui penyisihan SHU maupun pendayagunaan potensi masyarakat Desa/Kelurahan lokasi program seperti zakat, infaq, sodaqoh maupun bantuan sosial lainnya.

b. Pemberdayaan Pokmas UEP, meliputi:

1. Pembinaan Kelompok, melalui kegiatan pertemuan rutin, kunjungan langsung, bimbingan kelompok.

2. Peningkatan kemampuan SDM anggota Pokmas UEP meliputi kegiatan: pelatihan, magang, lokakarya dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan Pokmas UEP.

3. Penguatan kapasitas usaha Pokmas UEP meliputi: pinjaman permodalan, kemitraan bagi hasil, dukungan TTG untuk peningkatan mutu produk, peningkatan mutu manajemen usaha dan akses pemasaran.

4. Pendampingan usaha Pokmas UEP meliputi: bimbingan teknis produksi, konsultasi manajemen usaha, konsultasi akses permodalan dan mediasi kemitraan.

c. Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem dan prosedur yang ada.

Penetapan lokasi Pemberdayaan UPKu dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan acuan hasil pemetaan profil UPKu tahun sebelumnya. Lokasi Pemberdayaan UPKu didukung oleh kesediaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana penyertaan (*sharing*) dan adanya komitmen melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPP dan SOP. Adanya kesanggupan dari pemerintahan Desa/Kelurahan dan pengurus UPKu untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja UPKu. ([www.bapemas.jatimprov.go.id](http://www.bapemas.jatimprov.go.id))

UPKu di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan ini bernama UPKu Bina Insan Bahari. UPKu ini berfungsi membantu aspek teknis dan manajemen dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai. Pendampingan ini meliputi kegiatan inventarisasi potensi dan kebutuhan masyarakat pesisir dalam modal usaha, pemetaan jalur produksi, dan pasar serta kemungkinan pengembangan program melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak EF (L:35 tahun) selaku ketua UPKu Bina Bahari pada waktu itu yaitu sebagai berikut:

*“UPKu Bina Insan Bahari disini bertugas melakukan perencanaan, persiapan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan pelaporan kegiatan pelaksanaan P2MPPdi Desa Kilensari Kecamatan Panarukan yang diharapkan mengetahui karakter, potensi dan permasalahan daerahnya. Dari pemerintah juga tidak akan mencairkan dananya, jika daerah penerima Program P2MPP tidak terdapat UPKu”*

(wawancara tanggal 10 Januari 2014)

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak M (L:38) selaku Bendahara UPKu

Bina Insan Bahari yaitu :

*“Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten baru akan mencairkan dana, jika di Desa sasaran program telah dibentuk Unit Pengelola Keuangan dan Usaha. Jadi peran UPKu disini sangat vital. Tidak sampai disitu saja dana juga akan cair jika UPKu telah menentukan masyarakat penerima manfaat dari program P2MPP”*

(wawancara tanggal 11 Januari 2014)

UPKu merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pantai di tingkat masyarakat. Hal ini karena posisi UPKu yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran program atau kelompok masyarakat penerima manfaat, sehingga keberhasilan atau kegagalan usaha kelompok masyarakat penerima manfaat salah satunya karena faktor UPKu.

## **2) Kepala Desa**

Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan di dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai memiliki beberapa fungsi diantara sebagai Pembina. Pembina disini kepala desa menjalankan peran memonitoring pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai sejauh mana keberhasilan ataupun kendala – kendala yang dihadapi dalam program tersebut. Kepala Desa juga menjadi tenaga pendamping yang bersedia mendampingi masyarakat dalam bentuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam upaya menyiapkan rencana usaha, mengakses modal dan pengelolaan kegiatan usahanya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak ER (L:47 tahun) selaku Kepala Desa di Desa Kilensari, sebagai berikut :

*“Kepala Desa disini sebagai Pembina dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang berperan dalam memonitoring keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Kepala Desa juga berhak menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan program ini.”*  
(wawancara tanggal 9 Januari 2014)

Begitu juga seperti yang diungkapkan oleh EF (L:35) selaku ketua UPKu yaitu :

*“penetapan Rumah Tangga Sasaran selain ditetapkan oleh UPKu, Kepala Desa juga berhak menentukan penerima manfaat program P2MPP. Kepala Desa juga melakukan monitoring dalam pelaksanaan program.”*  
(wawancara tanggal 10 Januari 2014)

### **3) RTS (Rumah Tangga Sasaran)**

Penentuan penerima manfaat ditetapkan berdasarkan Musdes dan *hasil kajian* Tim Pendamping yang dimusyawarahkan dengan UPKu serta diketahui oleh Kepala Desa. RTS adalah sasaran penerima manfaat program pada kegiatan usaha simpan pinjam yang dikelola oleh UPKu. RTS penerima manfaat terdiri dari : Rumah Tangga Miskin (RTM), Rumah tangga hampir miskin dan pelaku ekonomi mikro.

Kategori Mendekati/hampir miskin dan miskin sesuai data PPLS'08 maupun RTS hasil pemetaan UPKu dan Tim Pendamping atas persetujuan Kades lokasi program, dengan membentuk kelompok masyarakat (POKMAS) yang beranggotakan 5-10 RTM. Pelaku-pelaku usaha mikro adalah Kelompok Usaha

Produktif yang melakukan aktifitas usaha dalam bidang perikanan, peternakan, industri kecil, pertanian dan wisata, serta memiliki prospek untuk dikembangkan.

**b. Proses pelaksanaan kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai.**

**1) Tahap Persiapan dan Sosialisasi**

Pelaksanaan proyek diawali dengan pemilihan lokasi sasaran program P2MPP. Penetapan lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan persyaratan, antara lain :

1. Usulan lokasi dari Pemerintah Kabupaten.
2. Desa Lokasi yang diusulkan memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat diandalkan yaitu potensi perikanan, potensi pariwisata, potensi transportasi laut dan potensi wilayah pesisir lainnya.
3. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), sesuai dengan data PPLS Tahun 2008.
4. Ada kesiapan dukungan dalam bentuk dana penyertaan (*dana sharing*) dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa berupa ruang/tempat sekretariat UPKu.
5. Adanya respon positif dari Pemerintah Desa terhadap program. (Sumber UPKu Bina Insan Bahari)

Untuk mendapatkan lokasi sasaran di tiap daerah yang ditetapkan, fasilitator bersama aparat setempat akan melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan data sekunder dengan data terakhir yang ada di lokasi sasaran.

Disamping data tersebut, pada tahap ini aspirasi pihak-pihak berkepentingan menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan lokasi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran P2MPP. Seperti di ungkap Bapak EF (L:35), sebagai berikut:

*“Pada tahap persiapan dan sosialisasi memegang peran penting pada keseluruhan pelaksanaan program P2MPP ini karena pelaksanaan program diawali dengan pemeriksaan daerah sasaran, apakah daerah tersebut memang layak dalam kriteria sasaran program P2MPP tersebut. Dan disini UPKU mempersiapkan suatu konsep yang menyeluruh dan dilakukan secara terencana dan terpadu. Mulai dari tujuan yang akan dicapai, siapa saja yang akan menerima sasaran bantuan program P2MPP.”*  
(wawancara 10 Januari 2014).

Pelaksanaan sosialisasi program meliputi :

- A. Sosialisasi Provinsi diselenggarakan oleh Bapemas Provinsi. Sosialisasi provinsi merupakan upaya penyebarluasan informasi program P2MPP pada tingkat provinsi. Sosialisasi di Provinsi bertujuan untuk memberikan penjelasan informasi mengenai program P2MPP pada tingkat Kabupaten, dan Stakeholders.
- B. Sosialisasi Kabupaten diselenggarakan oleh Bapemas Kabupaten. Sosialisasi di Kabupaten merupakan tindak lanjut sosialisasi Provinsi untuk memberikan penjelasan informasi mengenai program P2MPP pada Kepala Desa, dan BPD.
- C. Sosialisasi Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Sosialisasi di Desa merupakan tindak lanjut sosialisasi Kabupaten untuk memberikan penjelasan informasi mengenai program P2MPP pada pengelola program, perwakilan tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat. Dan pada sosialisasi desa diadakan Musyawarah Desa (Mudes). Musyawarah desa

adalah menjelaskan Program dan memilih calon pengurus UPKu. Mudes diselenggarakan oleh Kepala Desa.

Seperti di ungkap oleh Bapak ER (L:47 tahun) sebagai berikut:

*“Pelaksanaan program sosialisasi diadakan secara bertahap mulai dari Provinsi, Kabupaten dan Desa. Dan pada sosialisasi di Desa diadakan Mudes untuk menjelaskan program dan memilih calon pengurus UPKu”.*

(wawancara tanggal 9 Januari 2014)

Kegiatan sosialisasi P2MPP dimaksudkan agar tertanam suatu pengertian dan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang jelas, benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program, sehingga dapat memahami dan mampu melaksanakan program dengan tanggung jawab. Selain itu upaya sosialisasi juga diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung terlaksanannya program secara lancer dan dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, serta berkelanjutan.

## **2) Tahap Pengelolaan Dana P2MPP**

Pada tahap ini, dengan tersalurnya dana ke masyarakat melalui berbagai proses pembinaan berupa kegiatan pendampingan dan pada akhirnya pada tahap penyaluran dana P2MPP.

### **i. Penyaluran Dana P2MPP**

Penyaluran dana merupakan proses dan prosedur administrasi yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga, sejak dari pusat, daerah, desa hingga ke UPKu selaku sasaran utama P2MPP. Dana Program Pemberdayaan Masyarakat

Pesisir dan Pantai yang bersumber dari APBD Provinsi disalurkan ke rekening Ketua UPKu Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai melalui Bank Jatim setempat. Dana kegiatan P2MPP yang bersumber dari APBD Kabupaten ditransfer melalui rekening ketua UPKu setelah dikurangi dengan Biaya Operasional Program (BOP) untuk Bapemas Kabupaten. Selanjutnya dana P2MPP disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan digulirkan secara terus menerus. Seperti yang diungkap oleh Bapak M (L:38 tahun), sebagai berikut:

*“yang menjadi prinsip utama dalam proses penyaluran dan pencairan dana P2MPP dari UPKu kepada RTS/POKMAS yakni bahwa dana P2MPP disalurkan apabila RTS/POKMAS telah siap dan mampu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu upaya untuk memperoleh dana P2MPP yang dikelola UPKu hanya dapat dilakukan apabila RTS/POKMAS telah melakukan serangkaian kegiatan penguatan kapasitas, serta mengajukan usulan kegiatan dan usulan tersebut dinyatakan layak”*

(wawancara tanggal 10 Januari 2014)

a. Sharing pembiayaan Program

1. Pembiayaan Program Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai diatur secara sharing antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat sasaran program dan PTN Pendamping.

2. Pengaturan bentuk dana sharingnya, sebagai berikut:

- a) Besarnya dana program yang diterima oleh masing-masing lokasi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
- b) Sedangkan besar alokasi dana daerah untuk program bersama (sharing) yang bersumber dari APBD Kabupaten

ditetapkan dengan perhitungan minimal 45% dari dana APBD Provinsi;

- c) Pemerintah Desa wajib menyediakan sharing untuk mendukung pelaksanaan berupa penyediaan secretariat UPKu dan inventaris kantor maupun dukungan ATK untuk memfasilitasi penyiapan operasional UPKu.
- d) Sedangkan sharing masyarakat diwujudkan dalam bentuk simpanan dan swadaya masyarakat.
- e) PTN Pendamping dapat memberikan sharing dalam bentuk program, untuk mengoptimalkan kegiatan fasilitasi.

b. Proporsi Pembiayaan

1. Dana APBD Provinsi. Dana APBD Provinsi dipergunakan untuk dana kegiatan sebesar 93% dan Biaya Operasional Program (BOP) UPKu sebesar 7%, dengan rincian:

- a) Dana kegiatan sebesar 93% dipergunakan untuk:
  - 1) Kegiatan utama yang meliputi : pengembangan keterampilan teknis dan pelatihan masyarakat, peningkatan perekonomian pesisir dan pantai berbasis potensi wilayah, pengembangan konservasi dan pariwisata dengan memprioritaskan RTS kategori miskin dan mendekati/hampir miskin yang produktif sebesar 90%. Untuk kegiatan utama dibagi dengan rincian: peningkatan perekonomian

minimal 65% dan non perekonomian maksimal 35%.

2) Kegiatan penunjang meliputi : penguatan kelembagaan UPKu, sebesar 10%.

b) Biaya Operasional Program (BOP) UPKu

Proporsi penggunaan Biaya Operasional Program UPKu sebesar 7% dipergunakan untuk:

1) Insentif pengurus UPKu sebesar 40% untuk honor Ketua, Sekretariat dan bendahara selama 3 bulan dengan proporsi sesuai dengan musyawarah.

2) Operasional kesekretariatan UPKu sebesar 60% berupa pembelian ATK, peralatan kantor, penggandaan laporan dan proposal, bantuan transport, biaya koordinasi, pembelian papan nama dari kayu, spanduk, transport dan biaya musyawarah desa.

2. Dana daerah untuk program bersama (dana sharing) APBD Kabupaten

Dana APBD Kabupaten minimal sebesar 45% dari dana APBD Provinsi, yang dipergunakan untuk:

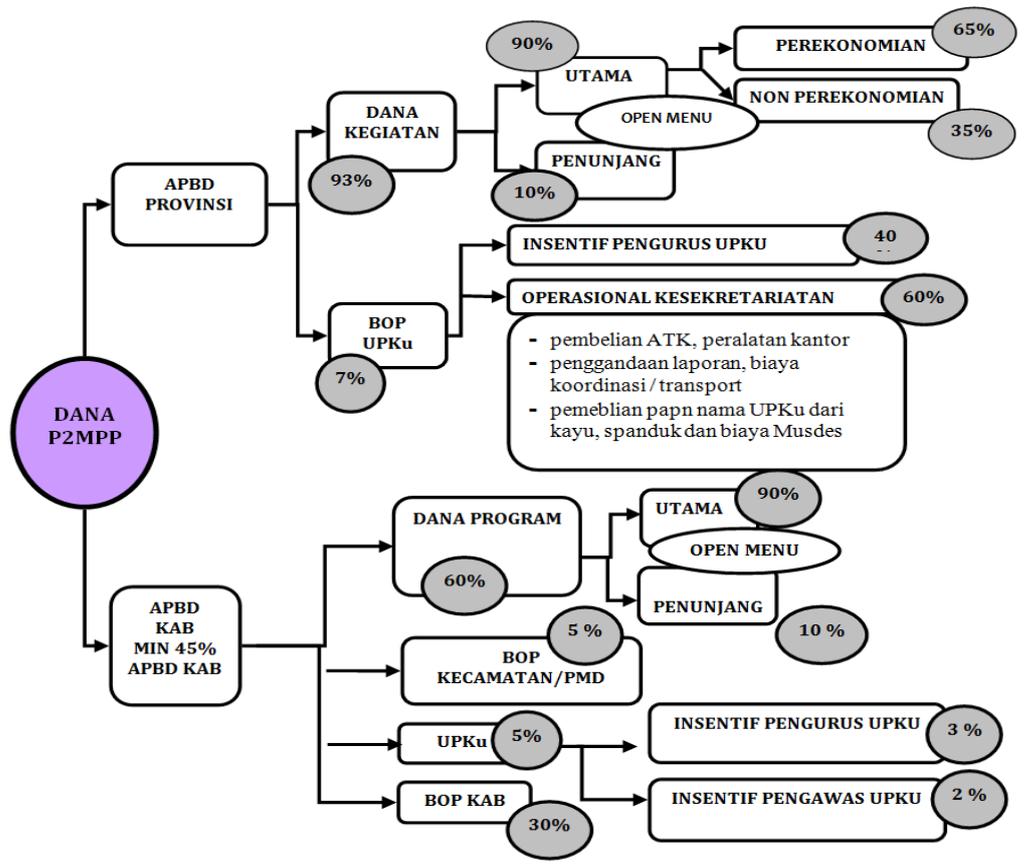
a) Dana kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai sebesar 60% terdiri dari:

1) Kegiatan utama sebesar 90%

- 2) Kegiatan penunjang sebesar 10%
- b) Biaya Operasional Program (BOP) Bapemas Kabupaten sebesar 30%, yang dipergunakan untuk:
  - 1) Sosialisai Kabupaten,
  - 2) Mendukung operasional kabupaten,
  - 3) Konsultasi dan perjalanan dinas ke provinsi,
  - 4) Fasilitasi dan monev pelaksanaan program,
  - 5) Pelaporan.
- c) Biaya operasional kecamatan/kasi PMD sebesar 5%.
- d) Biaya Operasional Program (BOP) UPku sebesar 5% yang dipergunakan untuk insentif pengurus UPKu sebesar 3% dan insentif pengawar 2%.

Proporsi penggunaan dana sharing dari APBD kabupaten, dapat disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah kabupaten lokasi program dengan tetap mempertimbangkan efektifitas kebutuhan program.

Gambar 5 Proporsi Pembiayaan Program P2MPP, sebagaimana dibawah ini:



Sumber: Data P2MPP Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan.

**ii. Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam (USP)**

**a) Pinjaman**

Pengertian pinjaman UPKu adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara UPKu dengan Pokmas yang beranggotakan RTS baik katagori miskin atau hampir miskin sesuai data PPLS'08 maupun hasil pemetaan UPKu dan TPM yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah jasa administrasi.

Pengertian tersebut di atas mengandung unsur-unsur, yaitu :



1. Unsur kepercayaan, yaitu mempercayakan sejumlah uang untuk dikelola peminjam.
2. Unsur waktu, yaitu adanya jangka waktu pengembalian pinjaman.
3. Unsur resiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pinjaman dan pelunasannya.
4. Unsur penyerahan, yaitu nilai ekonomi uang yang dikembalikan pada saat pelunasan nilainya sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pinjaman.

Dengan demikian dasar pertimbangan dalam pemberian pinjaman kepada peminjam adalah kepercayaan bahwa peminjam mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. UPKu percaya kepada peminjam bahwa pinjaman akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

#### **b) Jenis Pinjaman**

Jenis pinjaman yang diberikan UPKu berupa pinjaman modal usaha yang digunakan untuk mengembangkan usaha dengan jangka waktu pinjaman maksimal 10 bulan.

Sektor usaha yang dibiayai meliputi:

1. Perdagangan, contohnya: toko kelontong, warung makan, pedagang keliling, pedagang pasar, bakulan dan sebagainya.
2. Home Industri, contohnya pembuatan krupuk, tahu tempe batu bata, kerajinan dan sebagainya
3. Perikanan, (pengolahan dan perdagangan perikanan)
4. Pertanian, contohnya: sayuran, palawija dan sebagainya.

5. Peternakan, contohnya: ayam, itik, kambing dan sebagainya
6. Jasa, contohnya; foto copy, cuci cetak foto, sablon, penjahit dan sebagainya.

### c) Persyaratan Pinjaman

Persyaratan pinjaman antara lain:

1. Mengajukan permohonan pinjaman, dengan mengisi form yang telah disediakan.
2. Identitas peminjam, telah menjadi anggota UPKudengan cara: (i) mendaftar sebagai anggota UPKu, (ii) membayar simpanan anggota, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa, (iii) melampirkan foto copy KTP dan KK, dan (iv) sanggup mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur UPKu, (v) persyaratan lain yang dapat dibuat sendiri oleh UPKu seperti keharusan untuk ikut aktif dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh UPKu.
3. Legalitas usaha dari RT/RW
4. Kelayakan usaha, yang menunjukkan usaha tersebut layak untuk dipinjami modal.
5. Sanggup membayar simpanan wajib beku, yang besarnya sebagaimana telah ditetapkan oleh UPKu. Pembayaran simpanan beku dapat dilakukan di muka.

6. Bagi RTS yang akan meminjam agar membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang beranggotakan 5-10 orang Rumah Tangga Miskin (RTM) dan diusahakan memiliki kesamaan jenis usaha. (Sumber: UPKu Bina Insan Bahari)

Tabel 6 Kelompok Masyarakat penerima manfaat P2MPP di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yaitu

POKMAS	Anggota
Calepak	11 orang
Samudra	9 orang
Ikan Duyung	5 orang
Ikan Gurita	5 orang
Iputra Bahari	5 orang
Kontras	5 orang
Rumput Laut	10 orang
Batu Karang	11 orang

Sumber: Data P2MPP Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan.

**c. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program P2MPP di Desa Kilensari, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.**

Dalam setiap pelaksanaan suatu program tidak akan lepas kaitannya dengan faktor penghambat dan pendukung. Tujuan mempelajari faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan suatu program adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan suatu program agar apabila program

tersebut akan dilanjutkan pada masa yang akan datang dapat diminimalisir risikonya agar program yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan sempurna.

### 1) Faktor Pendukung

Sama halnya dengan program lainnya, program P2MPP juga memiliki faktor pendukung sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Dari hasil wawancara dengan responden dan data yang diperoleh dari dokumen pelaksanaan P2MPP serta hasil pengamatan, faktor yang mendukung pelaksanaan program P2MPP ini yaitu peran dan partisipasi stakeholder yang ada di program P2MPP ini, khususnya di daerah sasaran program, yaitu warga Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak HP (L:35 tahun) selaku sekretaris UPKu tentang faktor pendukung program ini, bahwa :

*“Faktor yang mendukung pelaksanaan P2MPP ini yaitu adanya usaha serta kerja para pelaku P2MPP ini sendiri. Hal ini dapat dilihat dari usaha mereka penuh kerja keras dalam melakukan setiap tugasnya demi kelancaran pelaksanaan P2MPP. Dan selain stakeholder yang ada yang penting juga sebagai faktor pendukung yaitu masyarakat yang turut aktif dalam pelaksanaan P2MPP ini.”*

(Wawancara tanggal 15 januari 2014)

Di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan tingkat partisipasi dari stakeholder ini sangatlah penting, karena sebagai penentu kelancaran dari P2MPP ini. Selain itu faktor pendukung lainnya yang berpengaruh yaitu keterlibatan masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, tanpa keikutsertaan masyarakat, maka kegiatan P2MPP yang ada tidak akan berjalan lancar. Sosialisasi program P2MPP ternyata tidak kalah penting sebagai faktor pendukung, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak EF (L:35 tahun), sebagai berikut:

*“hal yang berpengaruh pada pelaksanaan P2MPP ini yaitu pada tahap sosialisasi. Sosialisasi disini sangat membantu sebagai cara pengenalan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu program P2MPP ini dan membawa masyarakat ikut aktif terlibat dalam P2MPP”*  
(wawancara tanggal 15 januari 2014)

Oleh karena tahap sosialisasi dianggap sangat penting dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai, maka kepala Desa Kilensari memilih Ketua UPKu berasal dari lingkungan masyarakat sasaran program P2MPP. Diharapkan ketua UPKu yang sudah mengenal lingkungan dan karakteristik masyarakat pesisir mampu bersosialisasi dengan baik. hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak ER (L:47) yaitu :

*“karena tahap sosialisasi sangat penting, maka pemilihan ketua UPKu dipilih dari lingkungan masyarakat pesisir yang mengerti karakteristik masyarakat pesisir itu sendiri. Tapi pemilihannya tidak hanya berdasarkan itu faktor pendidikan juga diperhatikan. Maka dipilihlah bapak Erfan Faris lulusan S1 Muhammadiyah Malang yang juga bertempat tinggal di daerah pesisir.”*  
(wawancara tanggal 9 januari 2014)

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya petunjuk teknis pelaksanaan P2MPP yang mana sangat membantu para pihak-pihak terkait untuk melaksanakan proses pelaksanaan kegiatan P2MPP di Desa tersebut. Pelaksanaan Unit Simpan Pinjam dengan masa tenggang pembayaran 10 bulan juga termasuk faktor pendukung dalam program ini, karena pemberian masa tenggang tersebut berdasarkan musyawarah desa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Z (L:45) selaku pemanfaat USP dari program P2MPP:

*“Unit Simpan Pinjam yang dikasih oleh UPKu sangat membantu, dengan peminjaman yang lumayan banyak, masa tenggang pembayarannya juga lama. dan yang lebih enaknyanya itu dak ada jaminan dalam peminjaman tersebut.”*  
(Wawancara pada tanggal 16 januari 2014)

## 2) Faktor Penghambat

Apabila ada faktor pendukung, maka akan ada faktor penghambat. Sesuai dengan penelitian dan wawancara dengan ketua UPKu ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini. Yaitu Adanya Kredit macet dalam pemberian dana bergulir ini membuat pelaksanaan dalam USP di UPKu menjadi kurang kondusif. Kredit macet disini disebabkan karena usaha dari masyarakat bangkrut, masyarakat terkena musibah dan adanya niatan tidak membayar.

Pendapat tentang adanya faktor penghambat pelaksanaan P2MPP ini juga disampaikan oleh Bapak EF (L:35 tahun) selaku ketua UPKu, sebagai berikut:

*“Ada memang faktor yang sangat kurang mendukung dari pelaksanaan kegiatan P2MPP yaitu adanya kredit macet serta adanya juga program sejenis yang memberi bantuan hibah. Yang menyebabkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Hal ini menjadi hambatan bagi berkembangnya USP yang ada.”*  
(Wawancara tanggal 15 Januari 2014)

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak J (L:40) selaku penerima Manfaat dari program P2MPP yaitu :

*“Bantuan yang diberikan pemerintah adalah bantuan yang dikhususkan untuk masyarakat miskin. jadi menurut saya itu bukan suatu pinjaman.masak iya tetangga saya dapat bantuan secara cuma-cuma, terus bantuan yang diberikan kepada saya termasuk pinjaman. Iya saya dak mau bayar la”*  
(wawancara 15 Januari 2014)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang mendasar yang menjadi penghambat terlaksanya program ini dengan baik yaitu kredit macet serta adanya program lain yang sejenis yang memberikan bantuan hibah kepada masyarakat yang menyebabkan kecemburuan sosial dalam

masyarakat. Dan para penerima USP menganggap pemberian dana P2MPP yang diberikan dianggap sebagai bantuan hibah.

Bagi pelaku-pelaku usaha mikro, pelaku usaha mikro yang dimaksud disini adalah nelayan yang memiliki perahu sendiri. Pinjaman yang diberikan masih dianggap kurang. Karena dengan peminjaman dana maksimal 5 juta rupiah masih dinilai kurang membantu untuk pengembangan usahanya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak S (L: 48) selaku penerima manfaat P2MPP, yaitu:

*“dengan adanya Unit Simpan Pinjam ini sebenarnya lumayan abento, tape dana yang dikasih masih kurang untuk pengembangan usaha. Dana 5 juta bagi pelaku usaha mikro hanya cukup untuk pengoperasian saja.*  
(Wawancara pada tanggal 16 Januari 2014)

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) yang dilaksanakan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.**

Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan, namun meskipun banyak upaya telah dilakukan umumnya bisa dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang memuaskan. Sebelumnya program seperti ini umumnya menggunakan model top down approach yang cenderung menginterpretasikan pembangunan sebagai pengadaan pelayanan sosial, yang sepenuhnya ditentukan oleh birokrasi tanpa memperhatikan kelompok dan target group dari masyarakat. Kelemahan model ini adalah mengabaikan adanya feed back, membatasi kreativitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, cenderung mengabaikan

peranan kelembagaan dan kapasitas lembaga yang bersifat uniform serta mengabaikan variasi sosio kultural.

Desa Kilensari Kecamatan Panarukan merupakan salah satu Desa yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Situbondo yang mendapatkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) dimana P2MPP adalah salah satu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Program ini memang tidak jauh berbeda dengan program lainnya, terutama dalam segi pelaksanaannya. Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan dan sosialisasi, serta tahap pengelolaan dana P2MPP. Pelaksanaan P2MPP ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang bertugas dalam pelaksanaannya. Dari data yang didapat tugas-tugas dari pihak yang berwenang sudah jelas, hal ini mempermudah jalannya pelaksanaan program karena adanya kejelasan tugas dan wewenang tersebut.

Pemeriksaan desa sasaran yaitu Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Pemeriksaan ulang kelurahan adalah suatu kegiatan penilaian kembali sasaran-sasaran P2MPP untuk menentukan apakah desa tersebut memang sesuai, dengan kriteria lokasi sasaran P2MPP. Dasar penetapan lain mengapa lokasi ini adalah tingginya dinamika masyarakat pesisir dengan adanya pelabuhan perikanan dan sarana pendukung penangkapan ikan lainnya dengan kata lain, Desa Panarukan memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk dikembangkan.

Kegiatan sosialisasi P2MPP dimaksudkan agar tertanam suatu pengertian dan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh

masyarakat itu sendiri. Hal ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang jelas benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program, sehingga dapat memahami dan mampu melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab. Selain itu upaya sosialisasi juga diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung terlaksananya program secara lancar dan dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat berkelanjutan.

Sosialisasi dalam setiap kegiatan pembangunan memegang peranan yang teramat penting dan menentukan keberhasilan P2MPP di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan sebab proses sosialisasi ini merupakan titik awal dari kegiatan P2MPP. Sosialisasi dilakukan melalui penyebaran brosur kepada warga Desa Kilensari serta melalui penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kilensari. Selain itu sosialisasi di Desa Kilensari ini dilakukan dengan cara Musyawarah tingkat desa. Dengan kegiatan ini, maka diharapkan masyarakat dapat secara langsung memperoleh informasi tentang program P2MPP serta mempelajari dan mengetahui lebih banyak tentang P2MPP sehingga dengan adanya sosialisasi ini maka akan tertanam kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi di desanya dalam rangka melaksanakan program PE2MPP ini.

Dalam tahap sosialisasi merupakan bagian dari proses penyadaran masyarakat untuk memberdayakan diri sesuai dengan pendapat Sulistiyani (2004:83-84), dimana tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan sadar akan potensi yang

dimilikinya dan mempunyai keinginan untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik.

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan persiapan dan sosialisasi P2MPP telah dilakukan cukup baik, hal ini didukung oleh adanya proses pelaksanaan P2MPP yang telah dilaksanakan, seperti pertama, terbentuknya UPKu walaupun UPKu pada akhirnya sekarang menjadi hanya sebatas formalitas untuk meminjam dana yang ada.

Dalam pelaksanaan P2MPP ini terdapat 3 pendekatan yang dilakukan yaitu:

1. Kelembagaan
2. Pendampingan
3. Adanya Dana bergulir

Semua pendekatan diatas telah dilakukan dalam pelaksanaan P2MPP di Desa Kilensari, yang hasilnya yaitu terbentuknya kelembagaan ekonomi yang ada di masyarakat yaitu UPKu Bina Insan Bahari. Adanya pendampingan mulai dari tahap persiapan, sosialisasi hingga pelaksanaan kegiatan P2MPP yang di dampingi oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mendampingi yaitu UPKu serta tenaga pendamping dari provinsi yang telah ditunjuk. Serta pelaksanaan P2MPP yaitu adanya dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat. Pelaksanaan dari adanya dana bergulir tersebut yaitu adanya USP yang ada di Desa Kilensari ini, serta adanya pembinaan kelompok ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian yang didapat pelaksanaan dari USP itu sendiri kurang begitu efektif, hal ini dikarenakan hanya sebagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat saja yang kooperatif dan adanya kredit macet. Adanya Kredit macet

dalam pemberian dana bergulir ini membuat pelaksanaan dalam USP di UPKu menjadi kurang kondusif. Kredit macet disini disebabkan karena usaha dari masyarakat bangkrut, masyarakat terkena musibah dan adanya niatan tidak membayar. Dari penelitian yang didapat niatan masyarakat untuk tidak membayar dikarenakan adanya program lain yang sejenis yang memberikan bantuan hibah kepada masyarakat menyebabkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Dan para penerima USP menganggap pemberian dana P2MPP yang diberikan dianggap sebagai bantuan hibah.

Program pemberdayaan masyarakat adalah program pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat, program yang berpangkal dan berbasis masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, program yang berasal dari bawah yang berarti bahwa masyarakatlah yang mengusulkannya, serta program yang bersifat advokasi karena peran orang luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternatif pemecahan masalah kepada masyarakat. Dalam pembangunan yang mengedepankan masyarakat atau rakyat pemerintah hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Rakyat harus mendapat tempat untuk mengembangkan kemampuan. Apabila masyarakat diatur dan hanya dijadikan objek maka pemerintah akan kesulitan sendiri, karena seterusnya masyarakat tetap akan tergantung. Lain halnya jika masyarakat diberi kewenangan, maka masyarakat akan bisa mandiri.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, terdapat tiga proses tahapan pemberdayaan masyarakat yang perlu dilalui (Priyono, 1996 dalam suryono, 2006 hal. 147) yaitu:

1. Inisiasi. Masyarakat mendapatkan keberdayaan diri dari pihak luar, dilakukan oleh pihak luar dan diperuntukkan bagi masyarakat
2. Partisipatoris. Masyarakat mendapatkan keberdayaan dari pihak luar, dilakukan bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat.
3. Emansipatif .Masyarakat mendapatkan keberdayaaan dari, oleh, dan untuk mereka.

Menurut hasil dari pengamatan peneliti, pemberdayaan masyarakat yang terwujud melalui Program P2MPP dalam tahapan pemberdayaan masyarakat masih pada tahap inisiasi dan partisipatoris. Hal ini dikarenakan masih adanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program. Campur tangan yang dilakukan adalah dalam hal teknis pelaksanaan serta pembiayaan program.

Konsep pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh program ini terkendala oleh jumlah masyarakat miskin yang mengikuti program ini. Tidak semua masyarakat miskin menjadi anggota kelompok masyarakat dalam program ini. Hal ini disebabkan karena masih adanya sebagian masyarakat yang tidak berani untuk meminjam dana yang ada karena takut tidak bisa mengembalikannya. Hal ini patut disayangkan karena hanya sebagian masyarakat miskin saja yang terbantu dengan program ini. Dan yang disayangkan pula adalah dimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui P2MPP di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan ini masih masyarakat hanyalah sebagai penerima bantuan uang saja dan selebihnya itu masyarakat hanya diberi tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tepat dengan waktunya. Pemberdayaan ekonomi

masyarakat akan berjalan lebih efektif apabila masyarakat penerima bantuan diberi kesempatan untuk memperoleh pelatihan yang lebih berkualitas khususnya menyangkut usaha dan peningkatan keterampilan agar masyarakat lebih kreatif dalam memilih usaha. Tentunya pendekatan ini harus dapat dilengkapi dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, melalui pelatihan ketrampilan dengan teknologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pesisir setempat.

## **2. Pihak-Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai**

Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai terdapat tiga pihak terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha), Kepala Desa dan RTS (Rumah Tangga Sasaran). UPKu Bina Insan Bahari disini bertugas melakukan perencanaan, persiapan pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan pelaporan kegiatan program P2MPP di Desa Kilensari. UPKu merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program P2MPP di tingkat masyarakat. Hal ini karena UPKu yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran program atau kelompok masyarakat penerima manfaat, sehingga keberhasilan atau kegagalan usaha kelompok masyarakat penerima manfaat salah satunya karena faktor UPKu.

Begitu pentingnya peran UPKu dalam program P2MPP maka pada Musyawarah Desa (MUSDES) dalam pemilihan ketua UPKu mempertimbangkan beberapa hal yaitu, *Pertama* Ketua UPKu dipilih dari lingkungan sasaran program. Diharapkan dengan pemilihan ketua UPKu yang berasal dari lingkungan

sasaran program lebih mengerti keadaan di lingkungan tersebut, tidak hanya itu dengan begitu pula ketua UPKu akan lebih mudah dalam bersosialisasi dengan masyarakat karena sudah mengenal karakter dari masyarakat di lingkungan sasaran program tersebut; *Kedua* Pintar dalam berorganisasi. Jadi dalam pemilihan ketua UPKu selain mementingkan hal lingkungan juga diperlukan sifat berorganisasi. Maka pada MUSDES di Desa Kilensari dipilahlah Bapak Erfan Faris sebagai Ketua UPKu. Beliau merupakan S1 Sarjana Ekonomi Lulusan Universitas Muhammadiyah Malang yang berdomisili di lingkungan sasaran program.

Kepala Desa Kilensari Kecamatan Panarukan di dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai memiliki beberapa fungsi diantara sebagai Pembina. Pembina disini kepala desa menjalankan peran memonitoring pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai sejauh mana keberhasilan ataupun kendala – kendala yang dihadapi dalam program tersebut.

Penentuan penerima manfaat ditetapkan berdasarkan Musdes dan *hasil kajian* Tim Pendamping yang dimusyawarahkan dengan UPKu serta diketahui oleh Kepala Desa. RTS adalah sasaran penerima manfaat program pada kegiatan usaha simpan pinjam yang dikelola oleh UPKu. RTS penerima manfaat terdiri dari : Rumah Tangga Miskin (RTM), Rumah tangga hampir miskin dan pelaku ekonomi mikro.

Adanya bentrok tugas dalam pemilihan Rumah Tangga Sasaran antara UPKu dengan Kepala Desa, hal ini disebabkan karena UPKu dan Kepala Desa sama-sama berhak dalam pemilihan RTS. Dalam hal ini pihak terkait juga

menggunakan hubungan kekeluargaan dalam pemilihannya. Jadi ada beberapa masyarakat penerima manfaat yang merupakan saudara dari pengurus UPKu maupun Kepala Desa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam program P2MPP perlu adanya pembagian tugas yang jelas sehingga tidak terjadi bentrok tugas antara UPKu dengan Kepala Desa.

### **3. Manfaat Program P2MPP di Bidang Ekonomi.**

Dalam Upayanya mengentaskan kemiskinan, pemerintah tak hentinya dalam membuat program-program sebagai proses pembangunan di berbagai bidang khususnya bagi masyarakat pesisir. Sehingga perlu adanya suatu formulasi kebijakan yang mampu mengadopsi semua dimensi kemiskinan tersebut. Pemberdayaan dipandang sebagai suatu strategi yang dapat memenuhi keinginan tersebut. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi diharap dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya pada masyarakat pesisir.

Kemiskinan secara umum ditandai dengan adanya kondisi bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/ kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktifitas maupun usaha menjadi sangat terbatas. Dan bertolak pada pendapat Siagian (2005: 80) bahwa penduduk miskin dihadapkan pada "lingkaran setan" yang mengandung komponen:

1. Pendapatan perkapita rendah.

2. Yang berakibat pada ketidakmampuan menabung.
3. Yang pada gilirannya berakibat pada tidak adanya investasi.
4. Tidak adanya investasi berarti tidak adanya perluasan usaha.
5. Tidak adanya perluasan usaha berarti makin sempitnya kesempatan kerja.
6. Sempitnya lapangan kerja berarti tingginya tingkat pengangguran.
7. Pengangguran berarti tidak adanya penghasilan,
8. Tidak adanya penghasilan berakibat pada tidak bergesernya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.

Dengan adanya lingkaran setan tersebut maka dengan adanya bantuan dari program P2MPP ini yang berupa pinjaman yang diberikan kepada RTS (Rumah Tangga Sasaran) maka akan dapat meningkatkan pendapatan, dan memberikan kesempatan lapangan usaha baru. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan menunjukkan bahwa modal yang diberikan lewat pinjaman ini maka akan meningkatkannya pula produktifitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh RTS sehingga keuntungan yang mereka dapat semakin besar dan akhirnya meningkatkan pendapatan mereka tiap bulannya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari bahkan untuk masa depannya pula. Namun sayangnya pelaksanaan dari USP ini menurut peneliti kurang begitu efektif karena hanya bermanfaat bagi sekelompok kecil orang saja.

Dari hasil penelitian yang didapat, pelaksanaan program P2MPP ini banyak dirasakan pada pelaksanaan Unit Simpan Pinjam bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga hampir miskin, karena dana pinjaman yang

diberikan sudah lebih dari cukup. Namun dana pinjaman yang diberikan kepada pelaku ekonomi mikro masih kurang yaitu peminjaman maksimal hanya 5 juta rupiah. Sedangkan untuk pelaku ekonomi mikro dana sebesar itu hanya mencukupi untuk pembelian solar saja tanpa bisa mengembangkan usahanya.

Namun pada dasarnya dengan adanya pelaksanaan P2MPP ini, diharapkan manfaat untuk masyarakat menjadi lebih kondusif dan responsif dalam menanggapi program pembangunan pemerintah, dimana masyarakat tidak lagi bersikap pasif tetapi lebih aktif dan kritis. sikap-sikap inilah yang menjadi dasar upaya pemberdayaan masyarakat pesisir. Keberdayaan masyarakat ini ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menggali potensi dirinya serta memecahkan persoalan kemasyarakatan yang dihadapainya, terutama dalam masalah sosial ekonomi

#### **4. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.**

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada masyarakat untuk secara aktif menetapkan, melaksanakan, memelihara dan mewangasi pelaksanaan program. Dengan kata lain program P2MPP memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk aktif. Kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan ini menuntut dukungan sepenuhnya dari seluruh komponen yang ada dan kerjasama antar pemerintah

daerah dengan masyarakat sekitar sebagai kelompok sasaran. Dan dalam suatu program terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat dari hasil penelitian serta data-data yang didapat peneliti.

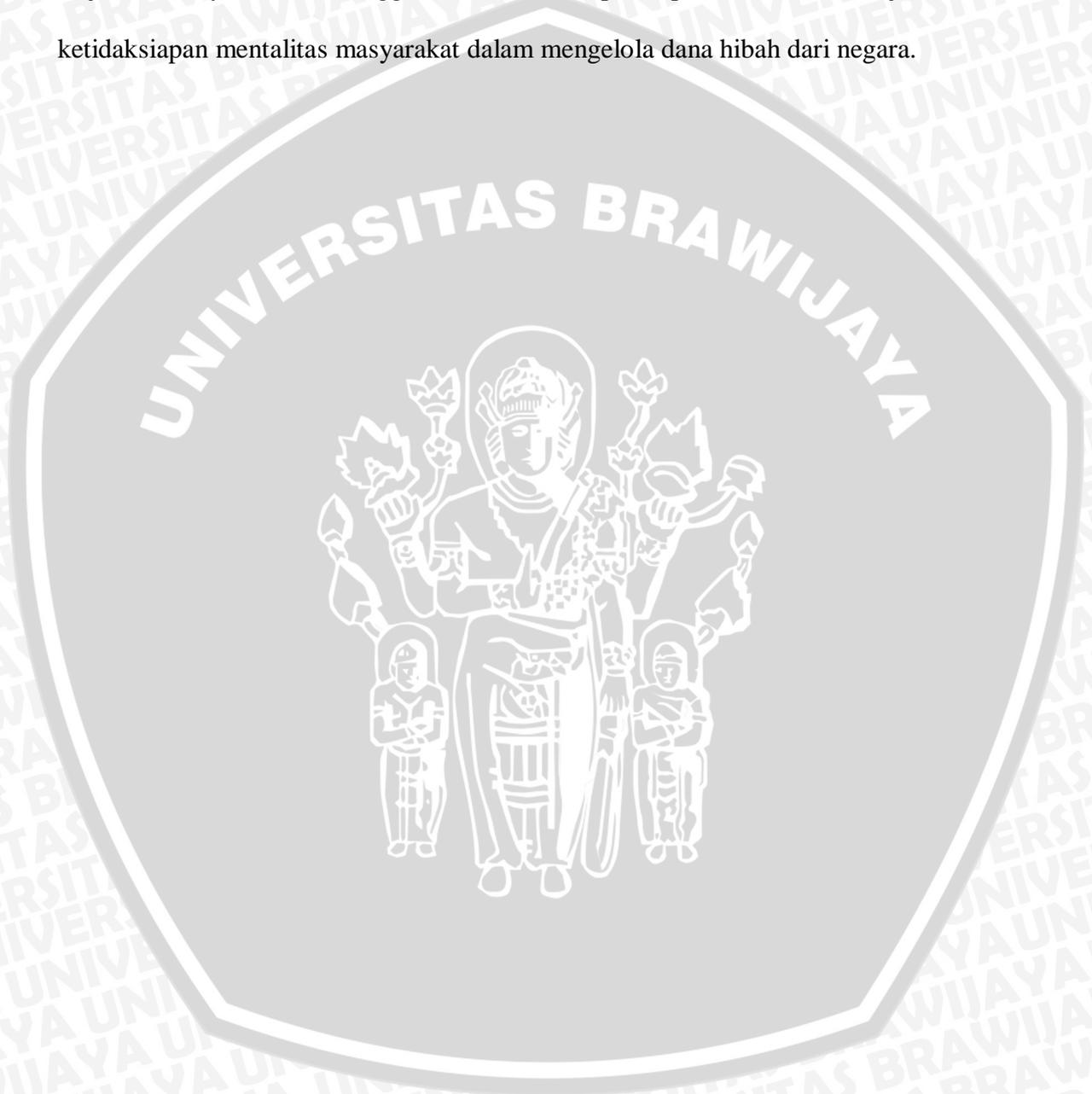
#### a) **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dari pelaksanaan program P2MPP di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan ini yaitu karena menggunakan pendekatan pemberdayaan yang mana memberikan kesempatan pada masyarakat seluas-luasnya untuk turut serta dalam program ini baik mulai perencanaan, pelaksanaannya dan pengambilan keputusan. Sehingga dalam pelaksanaannya timbullah partisipasi masyarakat. Tidak hanya masyarakat saja yang aktif berpartisipasi namun faktor pendukung lainnya yaitu adanya kerja keras perangkat Desa Kilensari dalam menjalankan tahap demi tahap proses pelaksanaan P2MPP di desa tersebut. Selain itu sosialisasi merupakan faktor penentu juga dalam pelaksanaan P2MPP di desa ini. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang jelas benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program, sehingga dapat memahami dan mampu melaksanakan program tersebut dengan aktif dan penuh tanggung jawab.

#### b) **Faktor Penghambat**

Hambatan dari pelaksanaan kegiatan P2MPP berupa USP yaitu adanya kredit macet. kemacetan kredit disebabkan oleh hal-hal seperti adanya kebangkrutan dari usaha masyarakat yang meminjam dan adanya musibah yang menimpa peminjam dan keengganan masyarakat dalam mengembalikan dana

tersebut, hal ini karena ada pandangan bahwa dana pemberdayaan ini merupakan pemberian cuma-cuma pemerintah kepada rakyatnya, sehingga peminjam tidak wajib hukumnya untuk mengembalikannya. Persepsi seperti inilah menunjukkan ketidaksiapan mentalitas masyarakat dalam mengelola dana hibah dari negara.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian hasil dan pembahasan terhadap fokus yang diteliti seperti yang telah dikemukakan pada bagian yang terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Program P2MPP mempunyai tujuan awal mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pada tahun pertama program P2MPP mempunyai prioritas yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia masyarakat pesisir yang relatif tertinggal daripada daerah lain. Untuk Selanjutnya program P2MPP lebih menekankan pada pendanaan.
  - a. Terdapat beberapa pihak-pihak terkait dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu
    - 1) UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha). UPKu merupakan yang mengatur pengelolaan dana yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. UPKu juga yang menentukan penerima manfaat P2MPP dengan persetujuan Kepala Desa. Selain itu UPKu juga melakukan pembinaan, peningkatan kemampuan SDM, penguatan

kapasitas usaha serta pendampingan usaha kelompok masyarakat penerima manfaat.

- 2) Kepala Desa. Fungsi kepala Desa disini ialah sebagai Pembina yang menjalankan peran monitoring pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai. Namun pada pelaksanaan program P2MPP terjadi bentrok tugas antara Kepala Desa dengan UPKu dalam pemilihan Rumah Tangga Sasaran.
  - 3) RTS (Rumah Tangga Sasaran). Terdapat tiga kriteria penerima manfaat program P2MPP yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM), Rumah tangga hamper miskin dan pelaku ekonomi mikro.
- b. Pada proses pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai terdapat dua tahapan yaitu:
- 1) Tahap persiapan dan dan sosialisasi. Tahap persiapan meliputi penetapan lokasi sasaran yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi dengan berbagai pertimbangan. Pada tahap sosialisasi dilakukan secara bertahap dari sosialisasi Provinsi, Kabupaten, Desa dan terakhir pada masyarakat. Pada tahap sosialisasi di masyarakat oleh UPKu masih kurang optimal. Ini bisa dilihat dari kesalahpahaman masyarakat dalam menanggapi program P2MPP. Sebagian masyarakat menganggap dana program dari P2MPP dianggap sebagai bantuan hibah.
  - 2) Tahap pengelolaan dana P2MPP. Pada tahap ini UPKu berperan penting, karena dana P2MPP sepenuhnya dikelola oleh UPKu

seperti penyaluran dana P2MPP serta pengelolaan usaha simpan pinjam.

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo yaitu:

- a. Faktor pendukung yaitu: partisipasi stakeholder yang ada di Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai ini baik pengurus program serta masyarakat yang turut aktif dalam program ini. Berkat kerja keras mereka program P2MPP ini berjalan dengan baik sampai sekarang dan menunjukkan keberlangsungan program. Manfaat dari Program P2MPP dapat dirasakan oleh masyarakat miskin dan masyarakat hampir miskin yang sangat membantu dalam hal permodalan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat tersebut.
- b. Faktor penghambat yaitu: adanya batasan pinjaman yang diberikan untuk masyarakat pelaku ekonomi mikro, serta adanya kredit macet pada pelaksanaan Unit Simpan Pinjam. kemacetan kredit disebabkan oleh hal-hal seperti adanya kebangkrutan dari usaha masyarakat yang meminjam dan adanya musibah yang menimpa peminjam dan keengganan masyarakat dalam mengembalikan dana tersebut, hal ini karena ada pandangan bahwa dana pemberdayaan ini merupakan pemberian cuma-cuma pemerintah kepada rakyatnya, sehingga peminjam tidak wajib hukumnya untuk mengembalikan. Persepsi

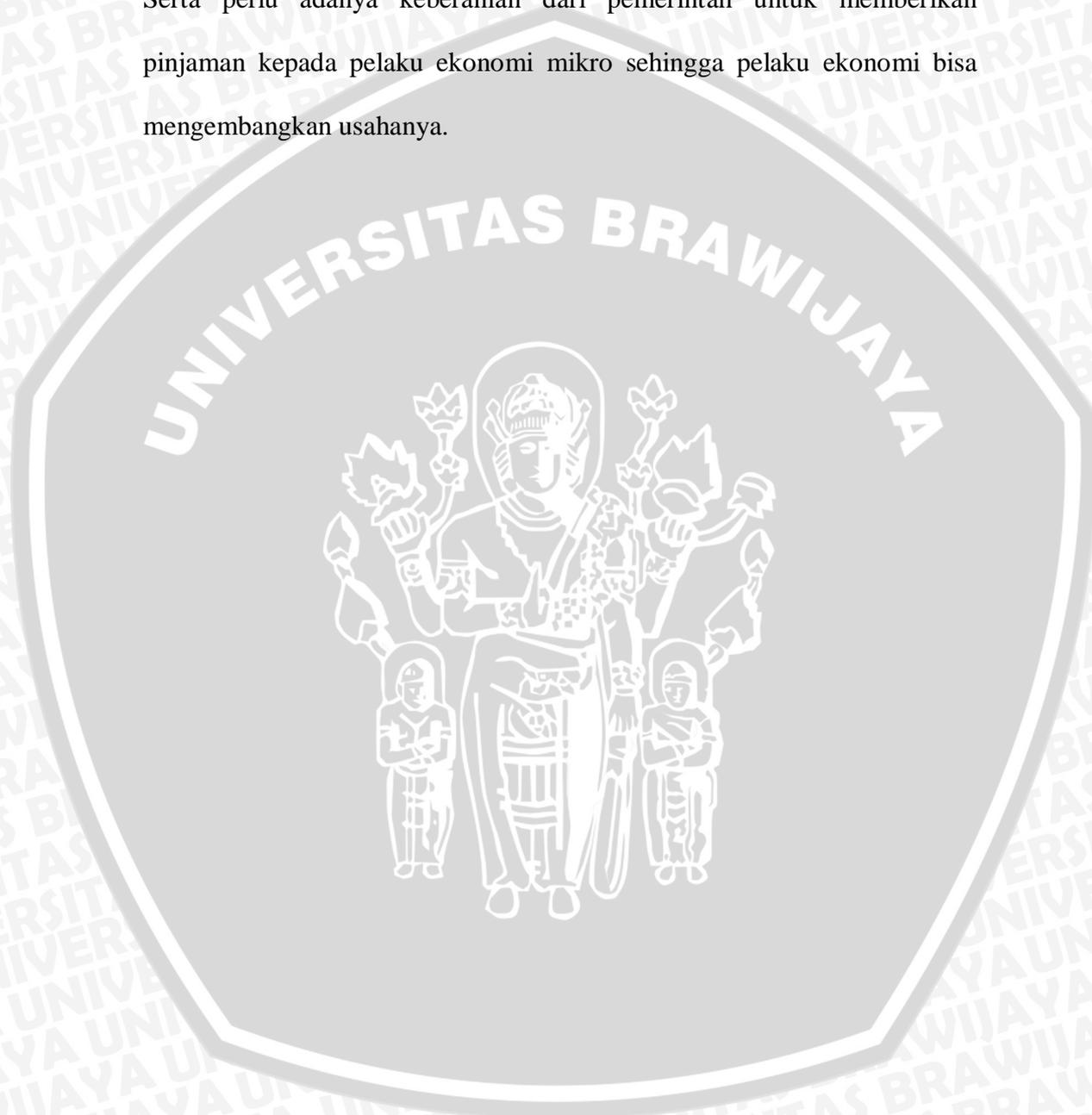
seperti inilah menunjukkan ketidaksiapan mentalitas masyarakat dalam mengelola dana hibah dari negara.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran-saran bagi penyempurnaan dan perbaikan program P2MPP di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan Pantai berjalan cukup baik diawal, namun pada tahun –tahun selanjutnya terjadi penurunan partisipasi. perlu adanya monitoring rutin yang dilakukan oleh Desa maupun provinsi agar tetap terjaga partisipasi masyarakat.
  - a. Untuk meminimalisasi bentrok tugas antara UPKu dan Kepala Desa perlu adanya komunikasi atau kerja sama yang baik agar terjalin suatu pemahaman yang sejalan. Penetapan RTS juga harus profesional, dengan tidak mengutamakan tali persaudaraan dari pengurus UPKu dan Kepala Desa.
  - b. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program, sehingga dapat tercapai pemahaman yang baik pada masyarakat sasaran sehingga dalam setiap kegiatan mereka turut berpartisipasi. Untuk pengelolaan dana UPKu diharapkan lebih selektif dalam pemilihan RTS agar dana simpan pinjam terus berputar.
2. Perlu adanya pembinaan dalam berwirausaha yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga

masyarakat mampu dan lebih berani untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan menyadari dan mengetahui potensi alam yang ada di desa mereka. Serta perlu adanya keberanian dari pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada pelaku ekonomi mikro sehingga pelaku ekonomi bisa mengembangkan usahanya.



## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: cv AlfaBeta.

Angka Kemiskinan di Indonesia <http://setkab.go.id/berita-9318-angka-kemiskinan-di-indonesia-terus-menurun-sejak-2007.html> tanggal akses 5 mei 2013

Bantuan Langsung Tunai <http://lucerahma.blogdetik.com/index.php/2012/03/blt-kebijakan-pemerintah-yang-kurang-bijak/> tanggal akses 5 mei 2013

Depdikbud. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen sosial RI 2008 <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24721/3/Chapter%20II.pdf> tanggal akses 23 maret 2013

Hasan, Iqbal, M. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Isfa, M.Y. 2002. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Sumber daya Manusia. *Jurnal ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. III No.2

Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1997),

Keban, Yeremias T., Ph.D., 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Kusnadi, 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Bantul: Pustaka Jogja Mandiri.

Kusnadi, 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.

Moleong, Lexy.J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy. J, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nazir, M. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

P. Siagian, Sondang, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi

Aksara

PNPM Mandiri <http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=54&Itemid=267> tanggal akses 5 mei 2013

Prasojo, E. 2004. People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. IV No.2

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai  
<http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/program/kegiatan-sda-ttg/288-pemberdayaan-masyarakat-pesisir-pantai> tanggal akses 30 Maret 20123

Siswanto, B, 2008. Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisa Kebijakan Pemerintah*. Airlangga University Press, Surabaya.

Soetomo, 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sugiono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

- Suharto, E. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gava Media
- Supriyadi, Bambang. 2007. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal*. PPS Unibraw.
- Suryono, A, 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan*. Malang: UM press
- Thoha, M. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Tjokroamidjojo, B. 1986. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin A. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zauhar, Susilo. 2003. *Administrasi Publik*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang

# LAMPIRAN - LAMPIRAN





UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA  
UPKu " BINA INSAN BAHARI "  
DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO  
JL. Raya Nomer 7 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan 68351

Kilensari, 24 Desember 2012

Nomor : 01/UPKu/ BIB/I/2012  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 ( Dua ) Bendel  
Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana  
Belanja Hibah Program Pemberdayaan  
Masyarakat Pesisir Dan Pantai ( P2MPP )

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Situbondo  
di -

**SITUBONDO**

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Realisasi Penggunaan Dana Belanja Hibah Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai ( P2MPP ) Tahun 2011 di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo  
Demikian untuk dijadikan maklum.

Mengetahui

Kepala Desa Kilensari



EREN FARISSA FANDA



EREN FARIS

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bapak Kepala BPMP Kabupaten Situbondo  
2. Ibu. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Situbondo

Halaman Pengesahan

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PANTAI  
(P2MPP)  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011**

1. Nama Kegiatan : Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)  
2. Lokasi : Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo  
3. Pelaksana : UPKu “ Bina Insan Bahari “  
4. Waktu Pelaksanaan : Juni – Desember 2011  
5. Anggaran : 1. APBD Provinsi Rp. 116.250.000,-  
2. APBD Kabupaten Rp. 31.706.250,-  
3. Swadaya Rp. ,-

---

**TOTAL Rp. 147.956.250,-**

*(Seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh enam  
ribu Dua ratus lima puluh rupiah )*

Situbondo, 30 Desember 2011

Mengetahui :  
Kepala Desa Kilensari



Menyetujui  
Pendamping

ZAINUDDIN, S.Pd

**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

SPM : 3063/SPM-LS/1.20.5.2/XII/2011  
 Tanggal : 20 December 2011  
 DPO : DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 (KHUSUS)

Dari : Kuasa BUD  
 Nomor : 6099/LS/XII/2011  
 Tanggal : 20 December 2011  
 Tahun Anggaran : 2011

Bank / Pos : Bank Jatim Cabang Situbondo  
 dimaksudkan mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0291000011 Uang sebesar Rp. 31.706.250,00 (terbilang :  
 tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah )

Tempat : BEND. UPKU BINA INSAN BAHARI/MARWOTO,DE  
 NIP :  
 Rekening Bank : 0292055251  
 Bank / Pos : BANK JATIM CAB. SITUBONDO  
 Peruntuk Untuk : PEMJAYARAN BLJ HIBAH KEPADA PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) BINA INSAN  
 BAHARI DESA KILENSARI KEC. PANARUKAN UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 PESISIR DAN PANTAI (P2MPP) TA. 2011

REKENING	URAIAN	JUMLAH
1.20.00.00.5.1.4.03.01	Pemerintahan Desa	31.706.250,00
<b>JUMLAH</b>		<b>31.706.250,00</b>

**Belangan -potongan:**

REKENING	URAIAN	JUMLAH
<b>JUMLAH</b>		

**Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)**

REKENING	URAIAN	JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan  
 Jumlah yang diminta Rp. 31.706.250,00  
 Jumlah Potongan Rp. 0,00  
 Jumlah yang Dibayarkan Rp. **31.706.250,00**  
 Jumlah Sejumlah Tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah

- tember 1 : Bank Yang Ditunjuk
- tember 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- tember 3 : Arsip Kuasa BUD
- tember 4 : Pihak Ketiga \*

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
 20 December 2011  
**KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH**  
 DINAS PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH  
**IWAN YUDHANTO, S.Sos**  
 NIP. 19710421 199402 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
**UPKU**  
 BINA INSAN BAHARI  
 DESA KILENSARI KEC. PANARUKAN  
**Marwoto, SE**

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BELANJA HIBAH  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PANTAI ( P2MPP )  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011**

NAMA LEMBAGA : UPKu " BINA INSAN BAHARI " Di Kilensari Kecamatan Panarukan  
PERIODE : DESEMBER 2011

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.	28 -12- 2011	Terima SP2D No.6099 Tanggal 28 Desember 2011	Rp.31.706.250		Rp.31.706.250
2.	29 -12-2011	Insentif Pengurus UPKu		Rp. 1.464.750	Rp. 30.241.500
3.	29-12-2011	insentif Pengawas UPKu		Rp. 946.500	Rp. 29.295.000
4.	30-12-2011	Pembelian hewan ternak ( kambing boer) 18 ekor kambing betina dan 3 ekor kambing jantan		Rp. 27.600.000	Rp. 1.695.000
5.	30-12-2011	Pembelian obat- obatan kambing		Rp. 1.695.000	0
<b>jumlah</b>			<b>Rp.31.706.250</b>	<b>Rp.31.706.250</b>	<b>0</b>



ERMAN FARIS

BENDAHARA

MARWOTO

DAFTAR PNERIMA INSENTIF PENGURUS UPKu

' BINA INSAN BAHARI'

DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

NO	NAMA	JABATAN	INSENTIF ( Rp )	KETERANGAN
1	Erfan Faris	Ketua	Rp. 488.250	1 
2	Marwoto, SE	Bendahara	Rp. 488.250	2 
3	Hery Prayitno	Sekretaris	Rp. 488.250	3 
<b>JUMLAH</b>			<b>1.464.750</b>	

Situbondo, 30 Desember 2011



Bendahara



**MARWOTO, SE**

DAFTAR PNERIMA INSENTIF PENGAWAS UPKu

' BINA INSAN BAHARI'

DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

NO	NAMA	JABATAN	INSENTIF ( Rp )	KETERANGAN
1	Erfan Riskafanda	Ketua	Rp. 473.250	1
2	Saningwar, A.Ma	Anggota	Rp. 473.250	2
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 946.500</b>	

Situbondo, 30 Desember 2011



Bendahara

*Handwritten signature of Marwoto, SE*

MARWOTO, SE





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
KECAMATAN PANARUKAN  
**DESA KILENSARI**

Jl. Raya Panarukan No.07 Panarukan 68351

**SURAT TUGAS**

Nomor : 470/155/431.508.9.3/10/2011

Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(DPA – SKPD) Tahun 2011 Nomor 914/62/213/2011 tanggal 3 Pebruari 2011  
Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa timur Tahun anggaran 2011,  
Program (P2MPP) Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada :

1. Nama : ERFAN FARIS  
Jabatan : Ketua UPKu “ BINA INSAN BAHARI “  
Desa Kilensari Kec.Panarukan Kab.Situbondo
2. Nama : HERY PRAYITNO  
Jabatan : Sekretaris UPKu “ BINA INSAN BAHARI “  
Desa Kilensari Kec.Panarukan Kab.Situbondo
3. Nama : MARWOTO  
Jabatan : Bendahara UPKu “ BINA INSAN BAHARI ”

Untuk : Mengadakan Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Rencana Realisai Program  
P2MPP pada Tanggal 25 Oktober 2011 di kantor BPMP Kabupaten Situbondo.

Dikeluarkan di : Kilensari  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2011



## DOKUMENTASI

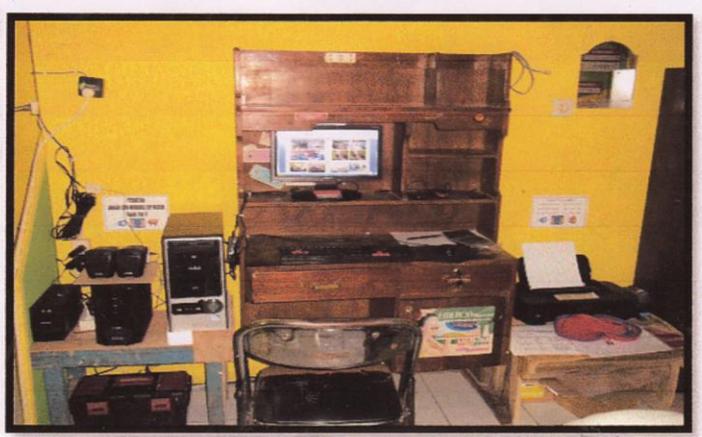
SOSIALISASI PROGRAM P2MPP  
DANA SHARING DI DESA KILENSARI  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011

---



# DOKUMENTASI

KANTOR UPKu BINA INSAN BAHARI  
DESA KILENSARI - PANARUKAN  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011



# DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala Desa  
Desa Kilensari Kecamatan Panarukan  
Pada tanggal 9 Januari 2014



# DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ketua UPKu dan Penerima Manfaat P2MPP

Desa Kilensari Kecamatan Panarukan

Pada tanggal 10 Januari 2014

